



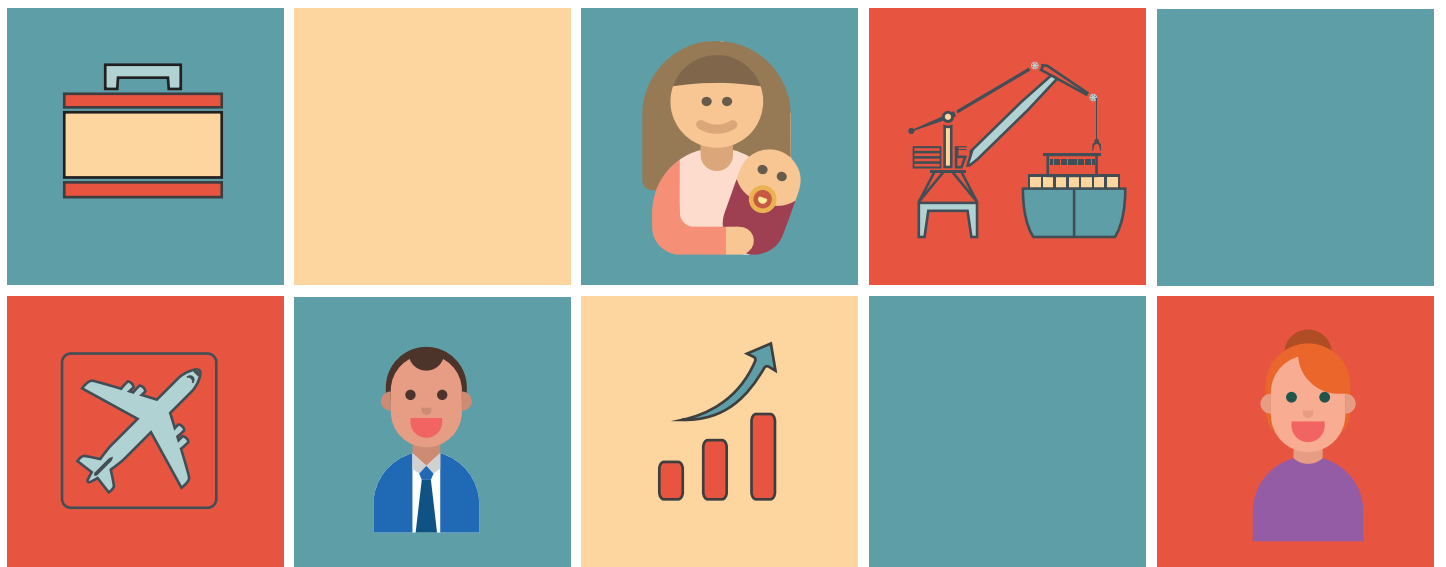
REPUBLIK  
INDONESIA



INFORMASI

# APBN 2019

APBN UNTUK MENDORONG INVESTASI DAN  
DAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA





INFORMASI

# APBN 2019

APBN untuk mendorong investasi dan daya saing melalui  
pembangunan sumber daya manusia

**Disusun oleh**

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran

**Penanggung jawab:**

Direktur Jenderal Anggaran

**Editor:**

Direktur Penyusunan APBN

**Kontributor:**

Pegawai dan pejabat Direktorat Penyusunan APBN

**Direktorat Jenderal Anggaran**

Gedung Sutikno Slamet Lantai 12

Jalan Dr Wahidin Raya No.1

[www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id)



# Daftar Isi

Kata Pengantar		Anggaran Pendidikan	25
Alur Penyusunan APBN	1	Anggaran Kesehatan	28
APBN 2019	2	Anggaran Infrastruktur	30
Hal Baru dan Strategis	3	KPBU	32
<b>Asumsi Dasar Ekonomi Makro</b>	<b>5</b>	Anggaran Perlindungan Sosial	33
Perekonomian Global	6	Anggaran Subsidi	35
Pertumbuhan PDB	7	<b>Transfer ke Daerah &amp; Dana Desa</b>	<b>38</b>
Nilai Tukar	8	Dana Transfer Umum	39
Inflasi	9	Dana Transfer Khusus	42
Harga Minyak Mentah	10	Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, & Dana Keistimewaan DIY	44
<b>Postur APBN 2019</b>	<b>11</b>	Dana Desa	45
APBN Sehat	12	<b>Defisit Anggaran</b>	<b>46</b>
APBN Mandiri	13	<b>Pembiayaan Anggaran</b>	<b>47</b>
APBN Adil	14	Pembiayaan Utang	48
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>15</b>	Profil Utang Pemerintah	49
Penerimaan Perpajakan	16	Pembiayaan Investasi	50
PNBP	19	Glossary	53
<b>Belanja Negara</b>	<b>21</b>		
Belanja Pemerintah Pusat	22		
Belanja K/L	23		
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi	24		

# KATA PENGANTAR

**Dengan** penuh rasa syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 23 November 2018, Rancangan Undang-undang APBN tahun 2019 telah resmi disahkan dan diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019. APBN tahun 2019 ini merupakan penjabaran tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, posisi APBN tahun 2019 semakin strategis sebagai instrumen Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dalam menopang perekonomian Indonesia agar tumbuh secara berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

**Tema** dari kebijakan fiskal yang akan dijalankan Pemerintah di tahun 2019 yaitu **"APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia"**. Sesuai tema tersebut, Pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok di dalam APBN tahun 2019 yaitu: pertama, mobilisasi pendapatan akan dilakukan secara realistis untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif. Kedua, Belanja negara yang produktif akan diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan program perlindungan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal. Ketiga, efisiensi serta inovasi pembiayaan akan menjadi landasan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah juga akan menyiapkan diri terhadap dinamika perekonomian global agar APBN dapat dijaga tetap sehat, adil, dan mandiri sehingga mempunyai daya ungkit terhadap perekonomian nasional.

**Selanjutnya**, dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengawal setiap rupiah yang ada di dalam APBN, sudah semestinya publik mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti atas berbagai kebijakan yang akan dijalankan pemerintah melalui APBN. Dengan demikian diharapkan masyarakat memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap APBN dan dapat mengawasi setiap rupiah yang dibelanjakan oleh Pemerintah, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh rakyat Indonesia.

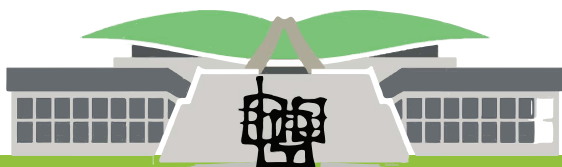
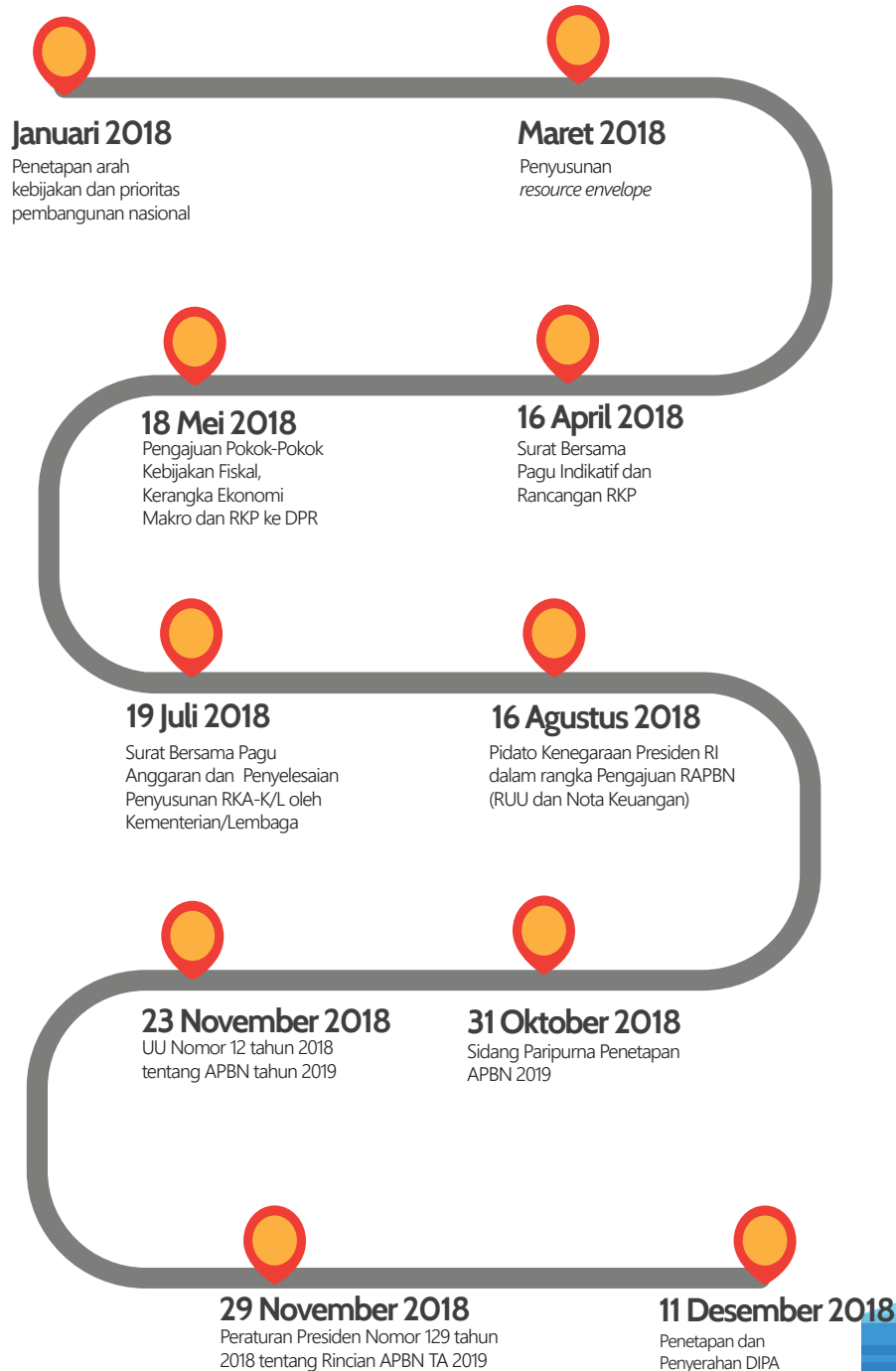
**Pada akhirnya**, sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan APBN yang kredibel, transparan dan akuntabel, kami berharap buku Informasi APBN ini dapat menjadi salah satu sumber yang valid dan terpercaya dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai APBN tahun 2019 kepada masyarakat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun dan kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga buku Informasi APBN 2019 ini dapat diterbitkan. Terima Kasih.

**Sri Mulyani Indrawati**  
Menteri Keuangan Republik Indonesia



# Alur Penyusunan

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019 dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI



# APBN 2019

2



**APBN untuk mendorong investasi & daya saing melalui pembangunan sumber daya manusia**

## Postur APBN Sehat, Adil, & Mandiri

- Antisipatif dan fleksibel menghadapi dinamika perekonomian global
- Defisit anggaran terendah sejak 2013
- Keseimbangan primer mendekati Rp0
- Pembiayaan utang menurun

## Belanja negara semakin produktif

- Reformasi belanja negara fokus untuk mendukung daya saing, ekspor, dan investasi
- Penguatan *value for money*
- Sinergi pusat dan daerah
- Semakin transparan dan akuntabel

## Penerimaan negara terus dioptimalkan

- Optimal namun tetap realistis
- Tetap menjaga iklim usaha & investasi
- Peningkatan PNBPN melalui peningkatan layanan dan tata kelola

## Memperkuat belanja untuk bencana alam dan mempercepat pembangunan di daerah

- Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Prov. NTB dan Sulteng
- Memperkuat Pemerintahan Daerah ditingkat Kelurahan

# Hal Baru dan Strategis

Beberapa kebijakan dan terobosan dalam APBN 2019 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan negara dan kemandirian APBN



## PENGUATAN BIDANG KESEHATAN MELALUI PROGRAM PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

- Perluasan program percepatan penanganan *stunting* melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif pada 160 kabupaten/kota

## PENAJAMAN ANGGARAN PENDIDIKAN

- Peningkatan kualitas dan relevansi **pendidikan vokasi** melalui standardisasi mekanisme *link and match* antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri
- Pengalokasian **dana abadi penelitian** untuk percepatan pengembangan riset



## PENGUATAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

- Penguatan program PKH melalui peningkatan besaran manfaat pada komponen pendidikan dan kesehatan



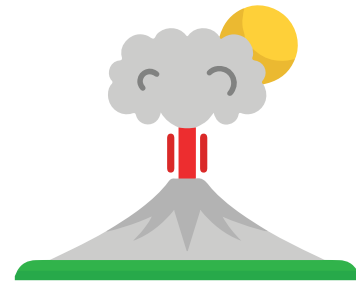


## TAX EXPENDITURE

- Insentif perpajakan sebagai transfer sumber daya kepada publik berupa pengurangan kewajiban pajak untuk mendukung daya saing industri nasional dan mendorong hilirisasi industri.
- Untuk pertama kalinya disampaikan perhitungan belanja perpajakan (*tax expenditure*) sebesar Rp143,6 T (1,16% dari PDB) pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebesar Rp154,7 T (1,14% dari PDB)

## POOLING FUND BENCANA ALAM

- Dana penanggulangan bencana alam (*pooling fund*) yang dikelola khusus, untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam
- Untuk pertama kalinya dialokasikan Rp 1,0 triliun



## PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI SKEMA KPBU

- Keterlibatan Peran Swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui KPBU AP
- Terdapat 10 Proyek Infrastruktur yang akan menggunakan skema KPBU AP pada tahun 2019

## PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT KELURAHAN MELALUI DAU TAMBAHAN

- Menjaga keseimbangan percepatan pembangunan antara kelurahan dengan desa melalui pendanaan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan
- Tanpa mengurangi komitmen kebijakan pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui APBD.
- Dana Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan dialokasikan Rp3,0 T kepada 8.212 kelurahan



# Asumsi Dasar Ekonomi Makro

- Pada asumsi dasar ekonomi makro APBN 2019, hanya nilai tukar rupiah dan *lifting* minyak yang mengalami perubahan dari asumsi yang diajukan Pemerintah di RAPBN 2019.
- Nilai tukar disesuaikan secara cepat untuk mengantisipasi kondisi global agar APBN menjadi lebih realistis dan kredibel dari Rp14.400 (RAPBN) menjadi Rp15.000 (APBN)

APBN 2019  
  Outlook 2018  
  Realisasi 2017



Pertumbuhan  
Ekonomi (%)

**5,3**

**5,2**

**5,1**



Suku Bunga  
SPN (%)

**5,3**

**5,0**

**5,0**



Inflasi (%)

**3,5**

**3,2**<sup>\*)</sup>

**3,6**



Harga Minyak  
(US\$/barrel)

**70**

**68**

**51**



Nilai Tukar  
(Rp/USD)

**15.000**  
RAPBN 2019: 14.400

**14.248**<sup>\*)</sup>

**13.384**



*Lifting* Minyak  
(ribu barrel/hari)

**775**  
RAPBN 2019: 750

**776**

**804**



*Lifting* Gas  
(ribu barrel setara  
minyak/hari)

**1.250**

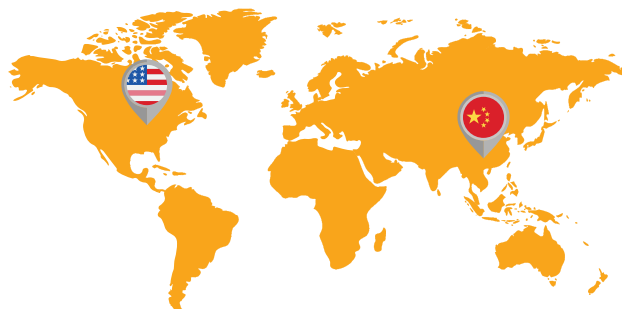
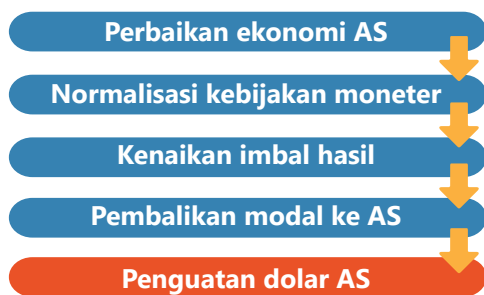
**1.136**

**1.142**

<sup>\*)</sup> Outlook menyesuaikan dengan realisasi s.d. bulan November 2018

# Perekonomian Global

Perekonomian global mengalami perbaikan dengan Amerika Serikat menjadi salah satu motor utama.



## Beberapa risiko dan tantangan bagi perekonomian global ke depan:



Tekanan pasar keuangan akibat normalisasi moneter AS



Moderasi Tiongkok



Proteksionisme



Perang Dagang AS-Tiongkok



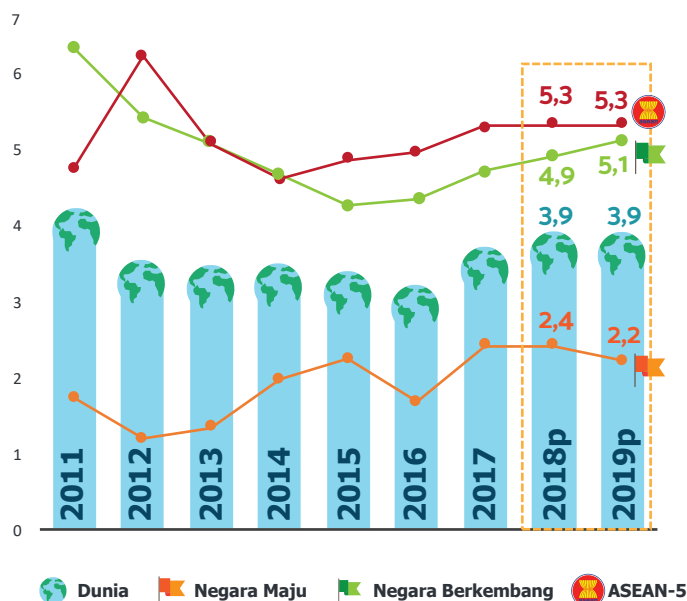
Ketegangan geopolitik



Perubahan iklim/cuaca ekstrem

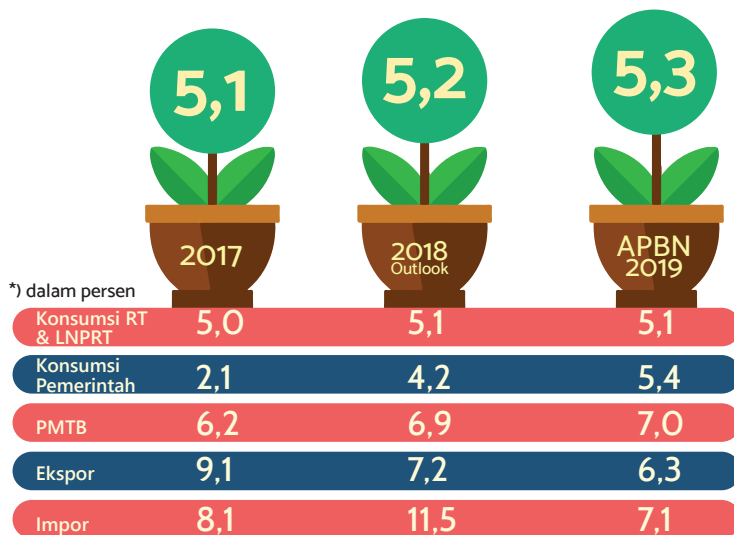
## Proyeksi Pertumbuhan Global (% yoy)

- Perekonomian global masih menyimpan risiko ketidakpastian sebagai dampak kebijakan ekonomi di Amerika Serikat serta lanjutan perang dagang dengan Tiongkok.
- Kondisi ini berimbas pada perekonomian banyak negara khususnya negara-negara berkembang dan masih akan berlangsung ditahun 2019



# Pertumbuhan PDB

Investasi meningkat, meskipun konsumsi masih mendominasi



## Perkiraan oleh Berbagai Institusi (%)

World Bank	5,1	5,4	IMF	5,3	5,5
Asian Development Bank	5,2	5,3	OECD	5,3	5,4
Consensus Forecast	5,2	5,3	● 2018		
			● 2019		

## Pendorong



Penyelesaian pembangunan infrastruktur diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong investasi.



Pemilu diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat, organisasi sosial dan partai politik serta belanja pemerintah.

## Tantangan



Kebijakan suku bunga acuan atas respon kenaikan FFR



Perkiraan pertumbuhan ekonomi global yang tetap dan perkiraan pertumbuhan volume perdagangan yang sedikit turun



Keberlanjutan perang dagang antara AS dan Tiongkok



Tahun pemilu dimana terdapat tendensi investor untuk *wait and see* setelah hasil Pemilu

## Dorongan Kebijakan Fiskal

Dalam menjaga momentum perbaikan pertumbuhan ekonomi di tengah pencapaian *stability over growth*



Perbaikan iklim investasi yang berorientasi ekspor dan peningkatan daya saing untuk memperbaiki struktur transaksi berjalan.



Pengembangan industri hulu yang akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku.

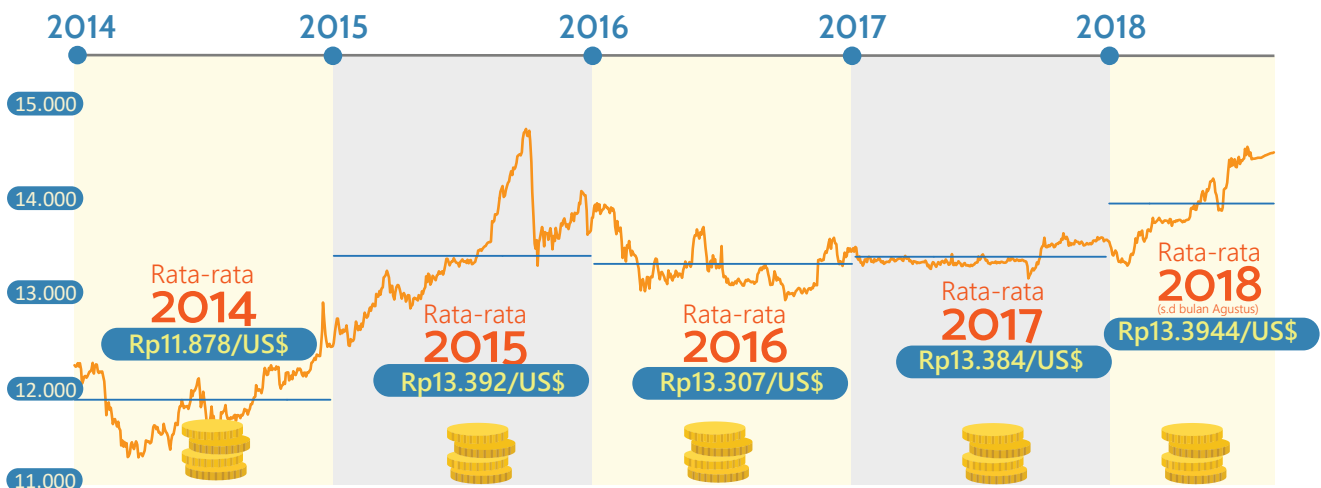


Dengan adanya risiko perang dagang, langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk memperbaiki struktur neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan.



# Nilai Tukar

Pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh faktor domestik dan luar negeri



## Kondisi ekonomi dunia diperkirakan masih bergejolak di tahun 2019



- Normalisasi kebijakan moneter AS yang disebabkan oleh perbaikan kinerja perekonomian AS
- Kebijakan fiskal AS yang cenderung ekspansif menyebabkan meningkatnya defisit dan yield US T Bills
- Kebijakan perdagangan proteksionis
- Kenaikan harga minyak dunia, permasalahan geopolitik

## Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah perlu didukung oleh:



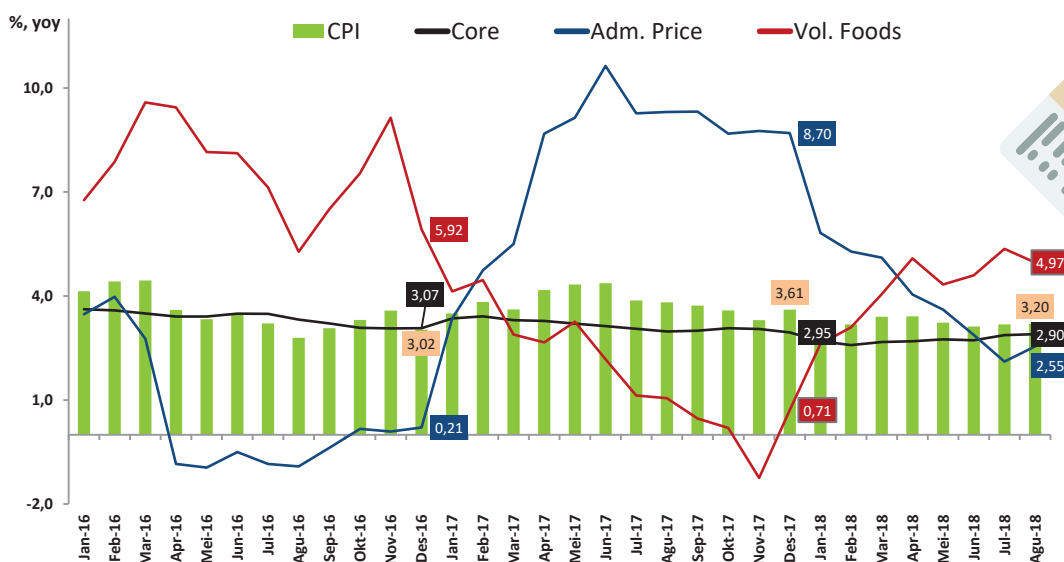
- Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat (inflasi yang terkendali, defisit fiskal yang sehat, serta peningkatan peringkat utang dan EODB)
- Kebijakan stabilisasi nilai Rupiah secara terukur sesuai dengan fundamental ekonomi oleh Bank Indonesia didukung cadangan devisa yang kuat
- Penguatan koordinasi kebijakan terus berlangsung dalam rangka memperbaiki stabilitas makroekonomi, termasuk koordinasi penyediaan pasokan dan kebutuhan valuta asing di antara BUMN



**Masih berlangsungnya kebijakan suku bunga rendah di Eropa dan Jepang**  
mengimbangi potensi *capital outflows* lanjutan

# Inflasi

Perkembangan perekonomian global dan domestik, seperti harga komoditas dan pergerakan nilai tukar Rupiah akan turut mempengaruhi pergerakan laju inflasi



**Laju inflasi dapat terus terjaga dengan tren menurun**, khususnya didukung oleh tren inflasi inti yang terus menurun dan stabil di tingkat yang rendah.



**Sumber tekanan terutama berasal dari komponen volatile food**, khususnya bahan pangan, walaupun volatilasnya semakin menurun dari tahun ke tahun.



**Pengelolaan kebijakan harga energi** saat ini mampu menurunkan tekanan administered price, namun tetap perlu diwaspadai risiko dan tekanan di periode ke depan.



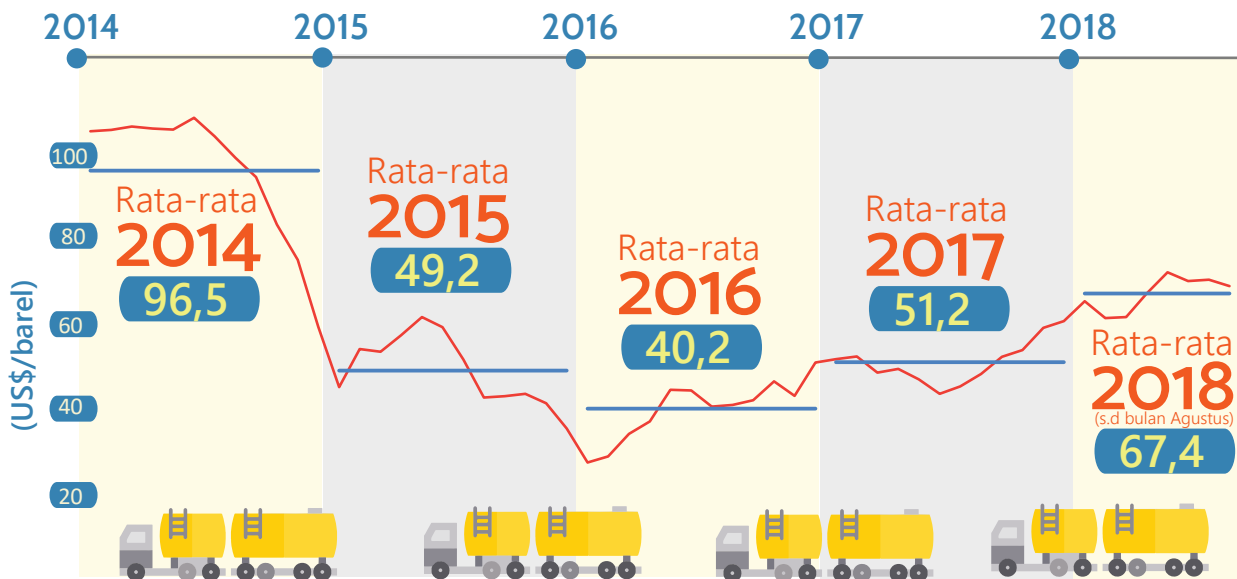
**Sasaran inflasi 2019-2021** ditetapkan 3,5+1,0%, dan terus menurun dalam jangka menengah untuk mendukung terjaganya daya beli masyarakat.



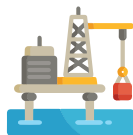
**Strategi dasar** adalah dengan menjaga keseimbangan ketersediaan pasokan dan permintaan barang, kelancaran distribusi, perbaikan efisiensi pasar, serta didukung upaya pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat

# Harga Minyak Mentah

Pergerakan harga minyak mentah masih cenderung berfluktuasi, dipengaruhi oleh risiko geopolitik dan perkembangan perekonomian global



ICP bergerak seiring dengan perkembangan harga minyak mentah acuan dunia, terutama Brent.



Faktor pendorong kenaikan harga adalah ketegangan geopolitik di beberapa negara penghasil minyak, sentimen pemangkasan produksi OPEC di tahun 2018, dan sanksi AS terhadap Iran dan Venezuela.

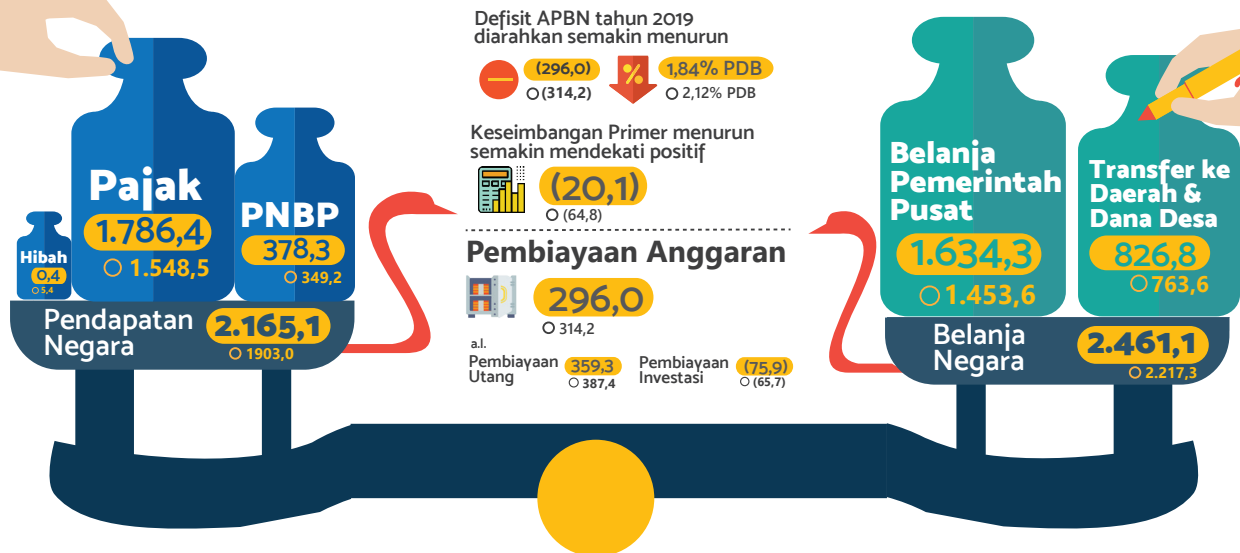


Faktor penghambat kenaikan harga, a.l. ketidakpastian keberlanjutan pemangkasan produksi oleh OPEC dan Rusia, penggunaan energi alternatif dan peningkatan produksi *shale oil*

# APBN 2019

Adil, sehat, dan mandiri dimana defisit dijaga pada angka 1,84% dengan *primary balance* mendekati Rp0

● APBN 2019 ○ Outlook 2018 ◉ triliun Rupiah



## Uraian (triliun Rupiah)

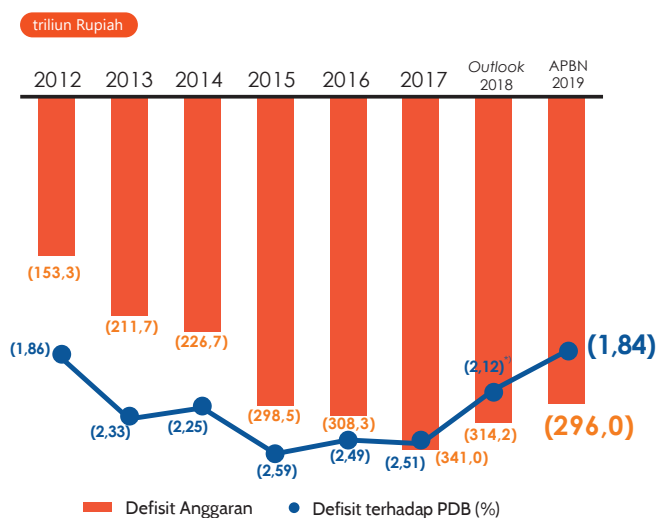
	2016	2017	2018	2019
	LKPP	LKPP	Outlook	APBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.555,9</b>	<b>1.666,4</b>	<b>1.903,0</b>	<b>2.165,1</b>
<b>I. PENDAPATAN DALAM NEGERI</b>	<b>1.546,9</b>	<b>1.654,7</b>	<b>1.897,6</b>	<b>2.164,7</b>
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.285,0	1.343,5	1.548,5	1.786,4
<i>Tax Ratio (%)</i>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>11,57</b>	<b>12,22</b>
a.l. PPh Migas	666,2	646,8	761,2	894,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	262,0	311,2	349,2	378,3
<b>II. PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>9,0</b>	<b>11,6</b>	<b>5,4</b>	<b>0,4</b>
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>1.864,3</b>	<b>2.007,4</b>	<b>2.217,3</b>	<b>2.461,1</b>
<b>I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>1.154,0</b>	<b>1.265,4</b>	<b>1.453,6</b>	<b>1.634,3</b>
1. Belanja K/L	684,2	765,1	813,5	855,4
2. Belanja Non K/L	469,8	500,2	640,2	778,9
<b>II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA</b>	<b>710,3</b>	<b>742,0</b>	<b>763,6</b>	<b>826,8</b>
1. Transfer ke Daerah	663,6	682,2	703,6	756,8
2. Dana Desa	46,7	59,8	60,0	70,0
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(125,6)</b>	<b>(124,4)</b>	<b>(64,8)</b>	<b>(20,1)</b>
<b>D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)</b>	<b>(308,3)</b>	<b>(341,0)</b>	<b>(314,2)</b>	<b>(296,0)</b>
% <i>Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	(2,49)	(2,51)	(2,12)*	(1,84)
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>334,5</b>	<b>366,6</b>	<b>314,2</b>	<b>296,0</b>
<b>I. PEMBIAYAAN UTANG</b>	<b>403,0</b>	<b>429,1</b>	<b>387,4</b>	<b>359,3</b>
<b>II. PEMBIAYAAN INVESTASI</b>	<b>(89,1)</b>	<b>(59,8)</b>	<b>(65,7)</b>	<b>(75,9)</b>
<b>III. PEMBERIAN PINJAMAN</b>	<b>1,7</b>	<b>(2,1)</b>	<b>(6,5)</b>	<b>(2,4)</b>
<b>IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN</b>	<b>(0,7)</b>	<b>(1,0)</b>	<b>(1,1)</b>	<b>0,0</b>
<b>V. PEMBIAYAAN LAINNYA</b>	<b>19,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>15,0</b>

\* Outlook pada laporan semester I dan pada akhir tahun diperkirakan akan dibawah 2,0% terhadap PDB



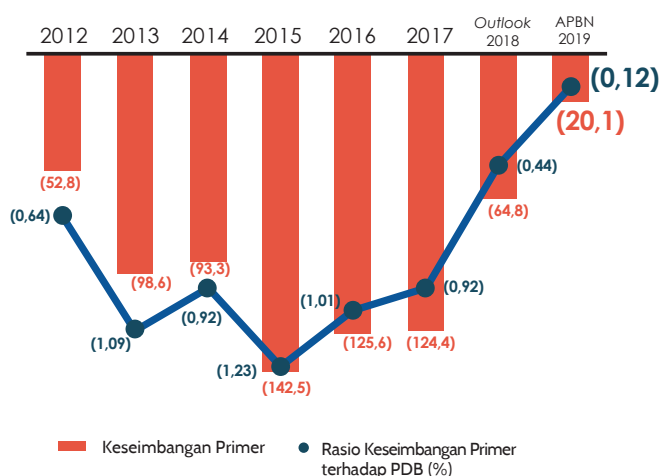
# APBN Sehat

Defisit semakin turun dan Keseimbangan Primer menuju arah positif sehingga APBN menjadi *sustainable* dan *prudent*



Rasio Defisit APBN diturunkan **menjadi 1,84% PDB**, terendah sejak tahun 2013

\*) Outlook pada Laporan Semester I tahun 2018. Sesuai proyeksi terkini, defisit APBN tahun 2018 diperkirakan dibawah 2% terhadap PDB (pada kisaran 1,8-1,9% terhadap PDB dengan defisit keseimbangan primer Rp6,7 T-Rp21,4 T)

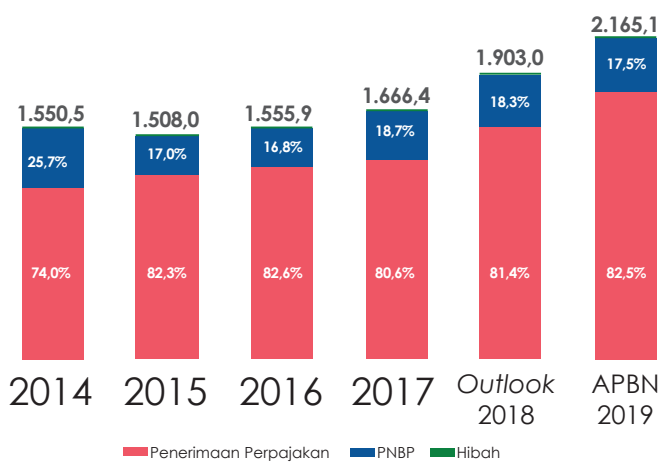


Keseimbangan Primer **mendekati Rp0** --> konsisten turun sejak 2015

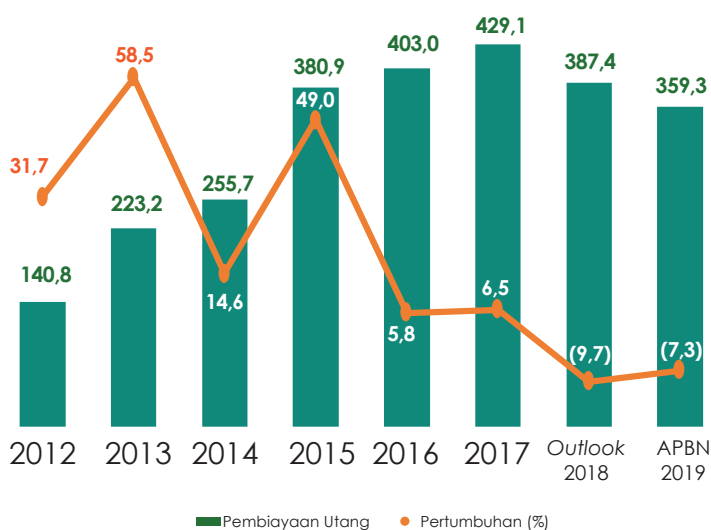
# APBN Mandiri

Ditunjukkan dengan penerimaan pajak menjadi sumber utama belanja negara dan tumbuh lebih realistis

triliun Rupiah



Kontribusi perpajakan terus meningkat menjadi **82,5%** (2014: 74,0%)



Pembiayaan utang semakin **menurun**

# APBN Adil

Ditunjukkan dengan keseimbangan antara Pembangunan Fisik dan SDM, Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pajak yang progresif



## Pajak Menjadi Insentif Untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat & Ekonomi

Kenaikan PTKP	Penurunan tarif PPh
2013 : Rp24,3 juta	UMKM menjadi
2016 : Rp54,0 juta	0,5%



## Insentif Pajak bagi Dunia Usaha secara targeted (tax holiday/allowance)

Kriteria/syarat tertentu a.l :

Industri  
Pionir



Mempertimbangkan nilai investasi, orientasi ekspor, dan penyerapan tenaga kerja



## Penguatan dan Keseimbangan Pembangunan Fisik dan SDM\*

### Anggaran Infrastruktur

2015 : Rp256,1 T  
2019 : Rp415,0 T

### Anggaran Kesehatan

2015 : Rp69,3 T  
2019 : Rp123,1 T

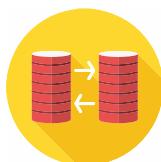
### Anggaran Pendidikan

2015 : Rp390,3 T  
2019 : Rp492,5 T

### Anggaran Perlindungan Sosial

2015 : Rp249,4 T  
2019 : Rp381,0 T

\* Anggaran-anggaran di atas memiliki irisan



## Memperkokoh keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah

### Transfer ke Daerah & Dana Desa:

2015 : Rp623,1 T  
2019 : Rp826,8 T



hampir sama

### Belanja K/L

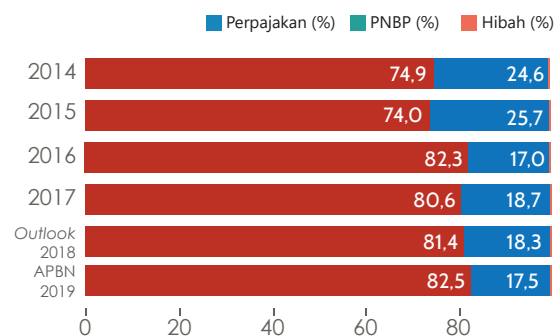
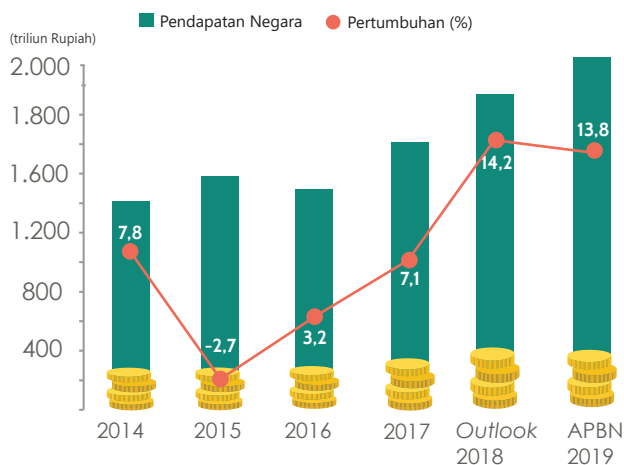
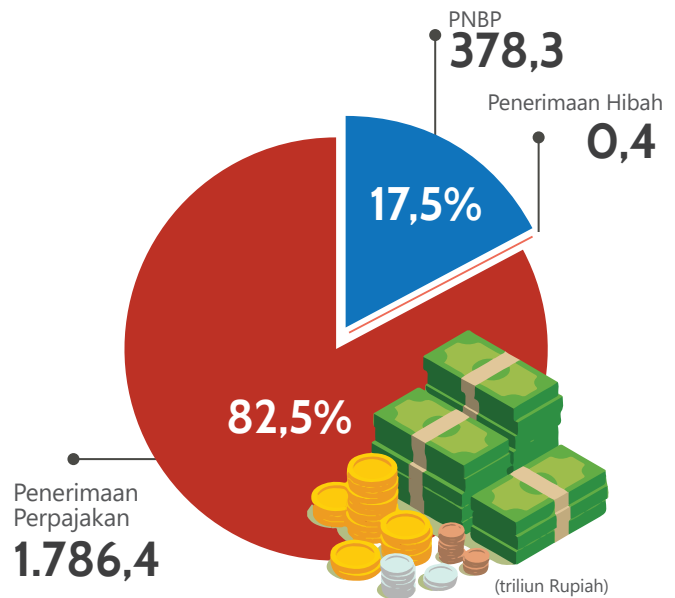
2015 : Rp732,1 T  
2019 : Rp855,4 T

# Pendapatan Negara

## Rp2.165,1 T

### Pajak Sumber Utama Pendapatan

Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyempurnaan regulasi dan IT Pajak serta PNBPN terus dioptimalkan dengan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat

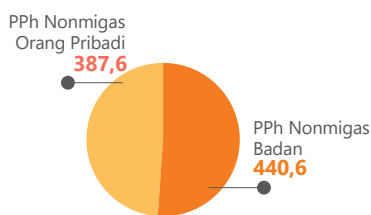
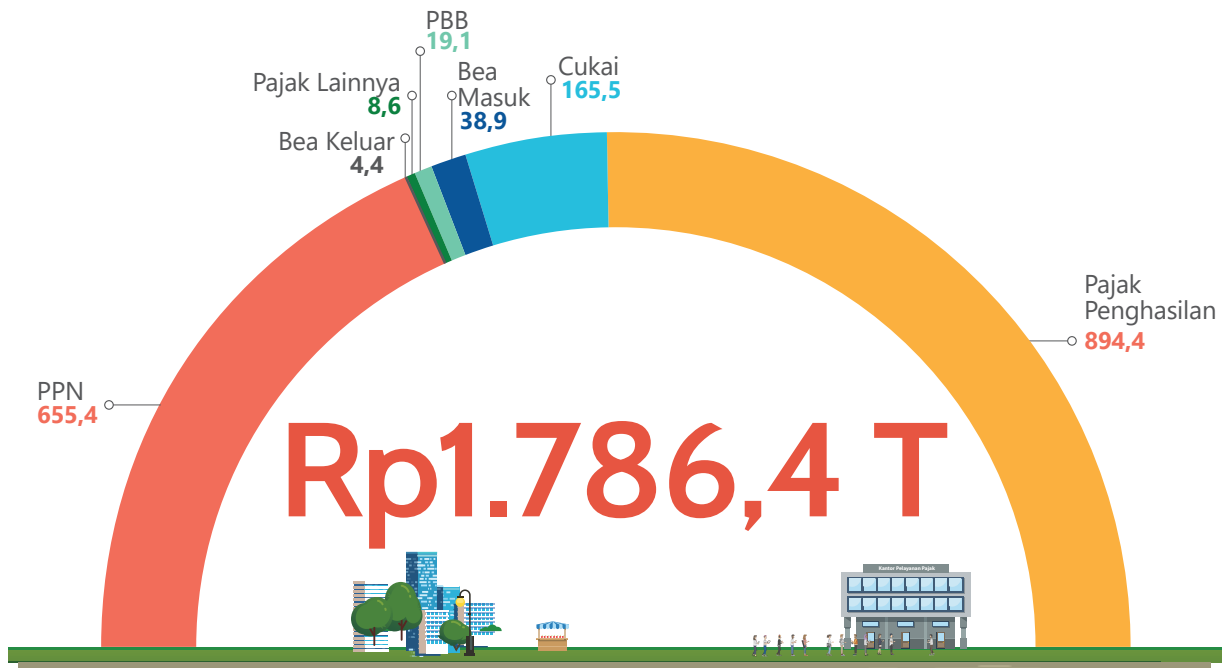


- Pendapatan Negara rata-rata tumbuh 6,9% selama periode tahun 2014-2019.
- APBN 2019, Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp2.165,1 triliun

Dominasi Penerimaan Perpajakan mencapai 82,5% di dalam APBN 2019. Sedangkan PNBPN berkontribusi sebesar 17,5%, dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan.

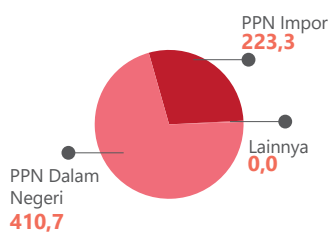
# Penerimaan Perpajakan

PPH dan PPN merupakan kontribusi utama, sebesar 50,1% dan 36,7% terhadap penerimaan perpajakan



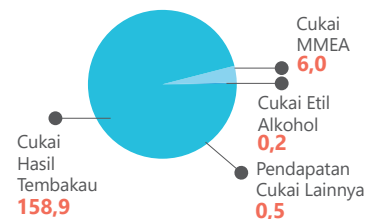
## PPh Nonmigas

Kenaikan PPh Non Migas didominasi oleh PPh Nonmigas Badan



## PPN

Kenaikan PPN didukung oleh upaya pemerintah mendorong konsumsi rumah tangga



## Cukai

Kenaikan cukai didorong oleh penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan program penertiban rokok ilegal

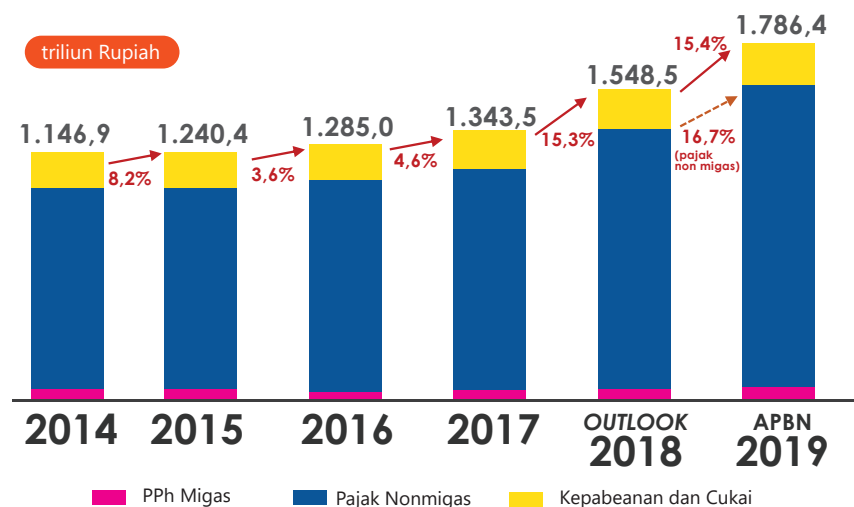
# Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan tetap realistis, diperkirakan tumbuh 15,4 % dari outlook APBN 2018 dengan didukung reformasi perpajakan

2019 tumbuh

# 15,4%

Pertumbuhan 2019 lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan 10 tahun terakhir (11,1%)



## Insentif Fiskal

Pemerintah tetap menjaga keberlangsungan iklim investasi dan peningkatan daya saing dengan memberikan insentif fiskal meskipun target penerimaan pajak meningkat.

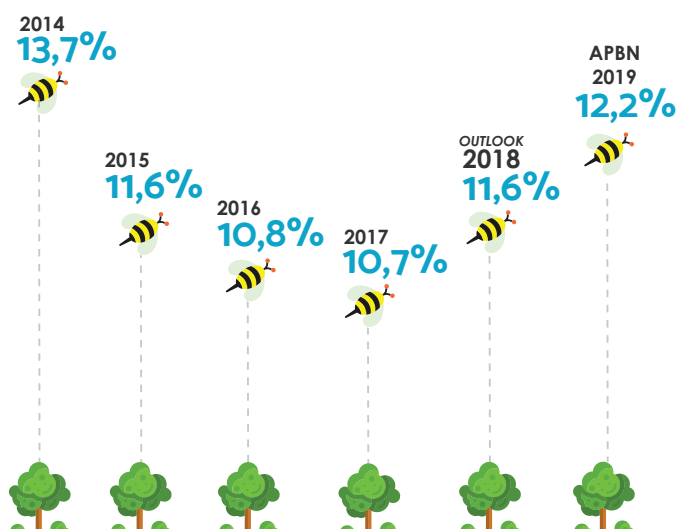


Insentif perpajakan yang tepat sasaran mendorong Pemerintah mampu memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian. Kebijakan belanja perpajakan (*tax expenditure*) sebesar

## 1,1% dari PDB

## Perkembangan *Tax Ratio*

*Tax ratio* diperkirakan akan lebih tinggi dengan diperhitungkannya unsur insentif atau pengurangan kewajiban perpajakan yang sekarang telah diberikan pemerintah (*tax expenditure*)



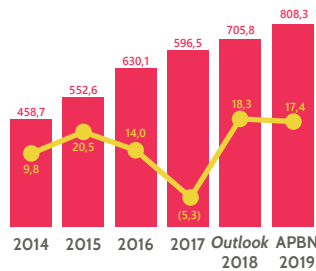
# Penerimaan Perpajakan

Kebijakan perpajakan berdasarkan asas keadilan mendorong daya saing industri dan kemudahan berusaha

## PPH Nonmigas, 2014-2019

(triliun rupiah)  
PPH Nonmigas naik rata-rata 12,4%

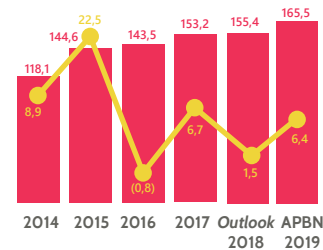
■ PPH Nonmigas  
● Pertumbuhan (%)



## Cukai, 2014-2019

(triliun rupiah)  
Cukai naik rata-rata 7,5%

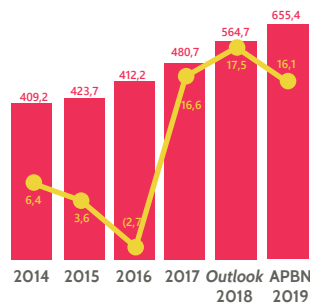
■ Cukai  
● Pertumbuhan (%)



## PPN, 2014-2019

(triliun rupiah)  
PPN naik rata-rata 9,6%

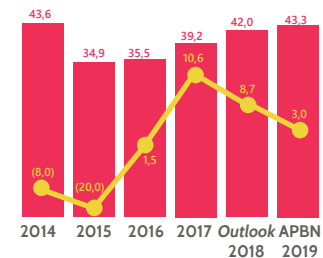
■ PPN  
● Pertumbuhan (%)



## Pajak Perdagangan Internasional, 2014-2019

(triliun rupiah)  
Pajak Perdagangan Internasional turun rata-rata 0,7%

■ Pajak Perdagangan Internasional  
● Pertumbuhan (%)



## Kebijakan di Bidang Perpajakan

### Automatic Exchange of Information (AEOI)

meningkatkan basis pajak mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (*Base Erosion Profit Shifting*)

### Data dan Sistem Informasi Perpajakan

*up to date* dan terintegrasi a.l. melalui *e-filing*, *e-form* dan *e-faktur*.

### SDM dan Organisasi

Peningkatan Pelayanan dan efektifitas organisasi

### Kepatuhan Wajib Pajak

membangun kesadaran pajak (*sustainable compliance*) a.l. melalui *e-service*, *mobile tax unit*, KPP Mikro, dan *outbond call*.

### Insentif Perpajakan

*tax holiday* dan *tax allowance* reviu kebijakan *exemption tax* pada beberapa barang kena PPN.

### Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

Pengembangan/perluasan fasilitas untuk industri kecil dan menengah (IKM)

### Memperbaiki dwelling time

Percepatan layanan Pusat Logistik Berikat dan simplifikasi prosedur ekspor

### Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai

Penggunaan IT untuk administrasi pemungutan dan pemberantasan penyelundupan

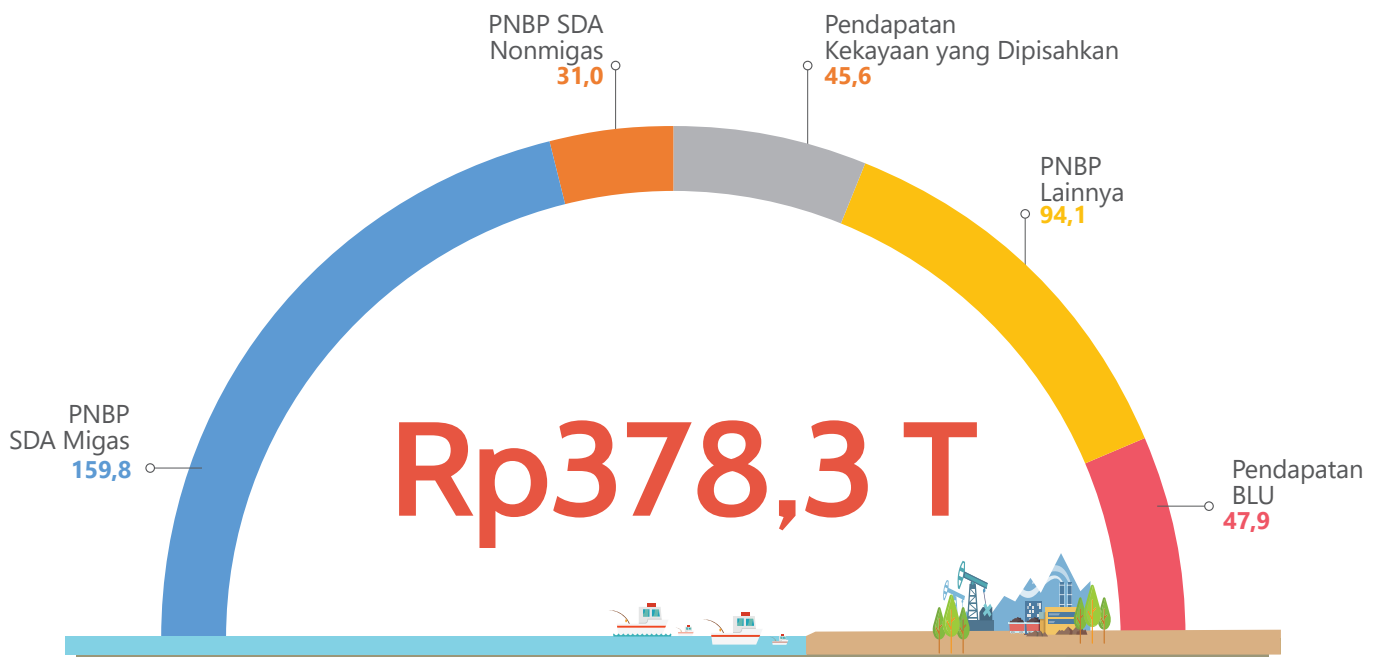
### Barang Kena Cukai (BKC) baru

Penambahan barang kena cukai (BKC) baru (kemasan plastik)

# PNBP

(Penerimaan Negara Bukan Pajak)

PNBP tahun 2019 ditargetkan tumbuh 8,35% dari *outlook* tahun 2018,



- **Optimalisasi produksi** diikuti upaya efisiensi biaya dan mendukung pengembangan industri hilir, kelestarian lingkungan dan keberlangsungan usaha



- **Peningkatan dividen BUMN** dengan mempertimbangkan *cashflow* BUMN dan kemampuan keuangan BUMN dengan pengembangan usaha dan menjalankan penugasan Pemerintah



- **Peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif** dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)



- **Perbaikan tata kelola (Revisi UU PNBP)**
  - Penyederhanaan tarif PNBP, khususnya terkait layanan
  - Penajaman perencanaan, pelaksanaan & pertanggung jawaban PNBP
  - Penguatan pengawasan dan pemeriksaan PNBP
  - Rumusan keberatan, keringanan, dan pengembalian PNBP



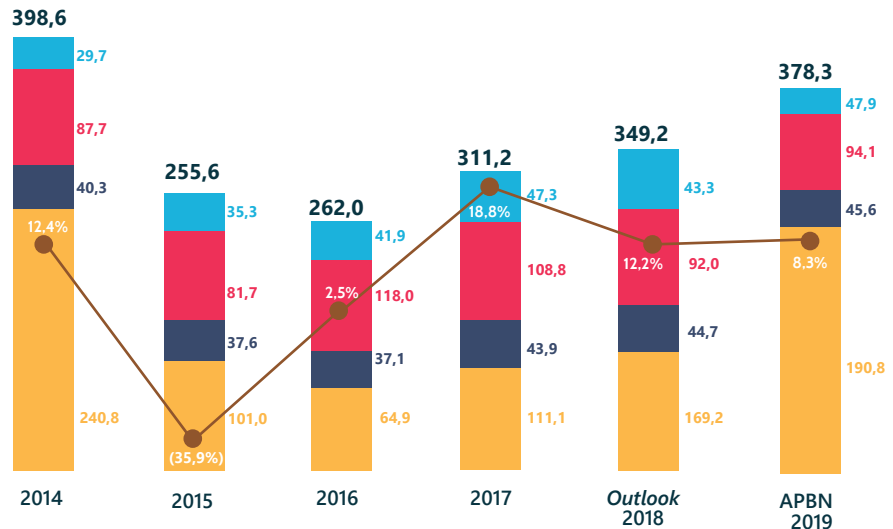
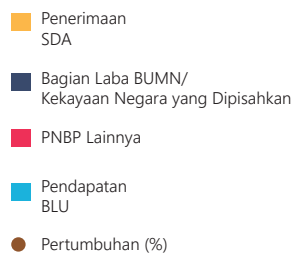
# PNBP

(Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Peningkatan PNBP didorong kenaikan harga minyak, peningkatan kualitas dan volume layanan, serta perbaikan tata kelola

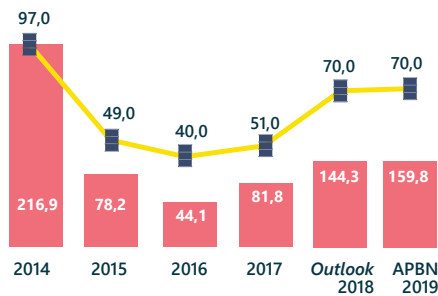
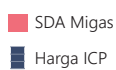
## PNBP, 2014-2019

(triliun rupiah)



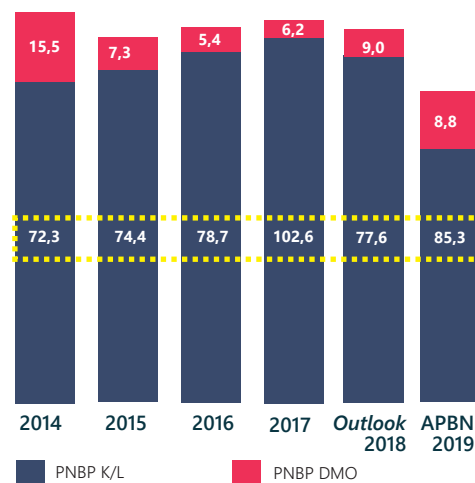
## SDA Migas, 2014-2019

(triliun rupiah)



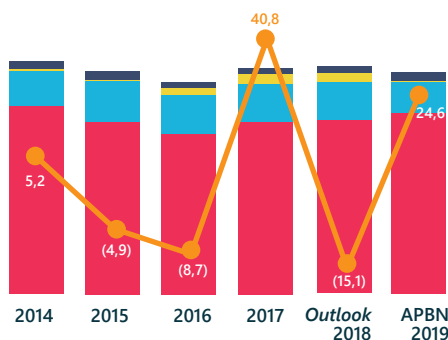
## PNBP Lainnya, 2014-2019

(triliun rupiah)



## SDA Nonmigas, 2014-2019

(triliun rupiah)



Tahun	Pertambangan Umum	Kehutanan	Perikanan	Panas Bumi
2014	19,3	3,7	0,2	0,8
2015	17,7	4,2	0,1	0,9
2016	15,8	3,8	0,4	0,9
2017	23,8	4,1	0,5	0,9
Outlook 2018	19,3	4,2	0,6	0,8
APBN 2019	25,0	4,5	0,6	0,9

- PNBP K/L ditargetkan sebesar Rp94,1 triliun, dengan kontribusi terbesar Kementerian Kominfo, Kepolisian Negara RI, dan Kementerian Perhubungan
- Potensi PNBP K/L masih dapat ditingkatkan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan masyarakat

# Belanja Negara

## Rp2.461,1 T

### Belanja Negara

diarahkan mencapai tujuan pembangunan nasional antara lain infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, dalam rangka pemerataan pembangunan dan perbaikan konektivitas dengan tetap menjaga efisiensi

## BELANJA NEGARA

Alokasi

Periode : 1/1-31/12 2019

• Belanja K/L **Rp855,4 T**

Porsi thd Belanja Negara: 34,8%

• Belanja Non K/L **Rp778,9 T**

Porsi thd Belanja Negara: 31,6%

• Transfer ke Daerah & Dana Desa **Rp826,8 T**

Porsi thd Belanja Negara: 33,6%

Total  
Alokasi

Rp2.461,1 T  
100%

diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional  
pahami.peduli.awasi



### Aparatur

- mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara antara lain dengan mempertahankan gaji dan pensiun ke-13, pemberian THR bagi pegawai aktif dan pensiunan, serta kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok sebesar 5%



### Efektivitas & Efisiensi Belanja

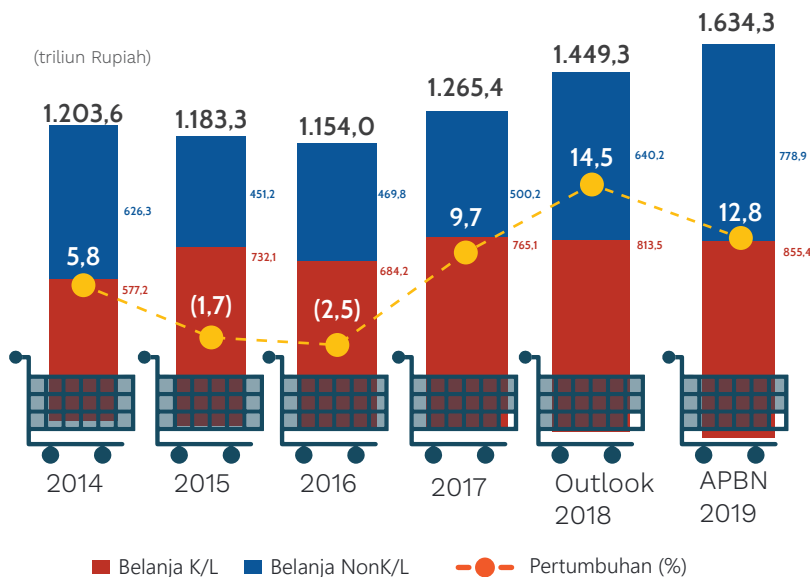
- mendukung penguatan belanja yang bersifat produktif, dan melanjutkan efisiensi belanja yang bersifat non-produktif
- meningkatkan kualitas belanja untuk peningkatan kapasitas produksi dan konektivitas, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi program



### Mendukung Program Prioritas

- Sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam bantuan sosial
- *Refocusing* anggaran prioritas
- Sinergi pembangunan antara Pusat dan Daerah
- Dukungan pemerintah terhadap *creative financing*

# Belanja Pemerintah Pusat



**Belanja K/L**  
**Rp855,4 T**

○ 2018: 813,5

**Belanja Non K/L**  
**Rp778,9 T**

○ 2018: 640,2

antara lain:

Subsidi Energi  
**Rp160,0 T**

Pembayaran Pensiun  
**Rp101,4 T**

Pembayaran Bunga Utang  
**Rp275,9 T**

## Fokus Belanja Pemerintah

### Pembangunan Sumber Daya Manusia

- Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan vokasi
- Mempersiapkan tenaga pendidik yang adaptif dan responsif
- Memperkuat program promotif dan preventif, peningkatan layanan kesehatan, dan menjaga keberlanjutan JKN
- Pemerataan akses ke layanan kesehatan

### Penguatan Infrastruktur

- Infrastruktur pelayanan dasar
- Infrastruktur konektivitas untuk kelancaran barang dan jasa
- Infrastruktur untuk mendukung sektor unggulan (a.l. pangan, pariwisata, perikanan)
- Dukungan pendanaan proyek-proyek infrastruktur dengan skema pembiayaan kreatif (KPBU)

### Mendorong efektivitas Program Perlindungan Sosial

- Sinergi program perlindungan sosial (PKH, BPNT, Subsidi)
- Penerima manfaat subsidi dan bansos yang lebih tepat sasaran → perbaikan data
- Penguatan PKH dan BPNT, serta perluasan sasaran JKN (PBI)

### Pelaksanaan Agenda Demokrasi

- Pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2019
- Pengamanan Pemilu 2019
- Sosialisasi Pemilu 2019
- Dukungan penyiaran kegiatan Pemilu 2019

### Birokrasi yang Efektif dan Efisien

- Produktivitas, integritas, dan pelayanan publik (a.l. tetap memberikan gaji dan tunjangan ke-13, pemberian THR, serta kenaikan gaji pokok rata-rata 5%)`

### Antisipasi ketidakpastian

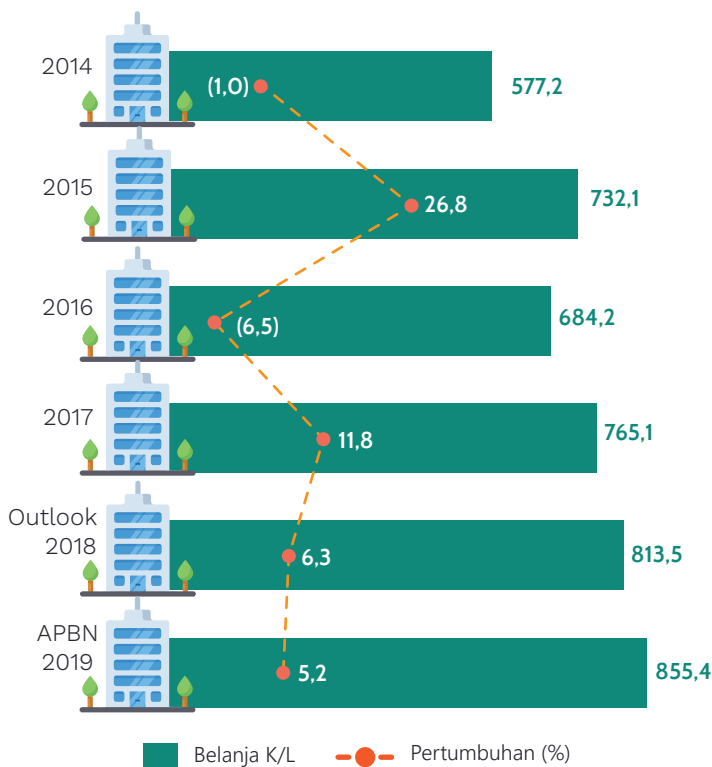
- Mitigasi risiko bencana antara lain melalui pembentukan dana siaga bencana serta skema lainnya
- Pelestarian lingkungan
- Stabilitas ekonomi, keamanan & politik

# Belanja K/L

Dialokasikan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional

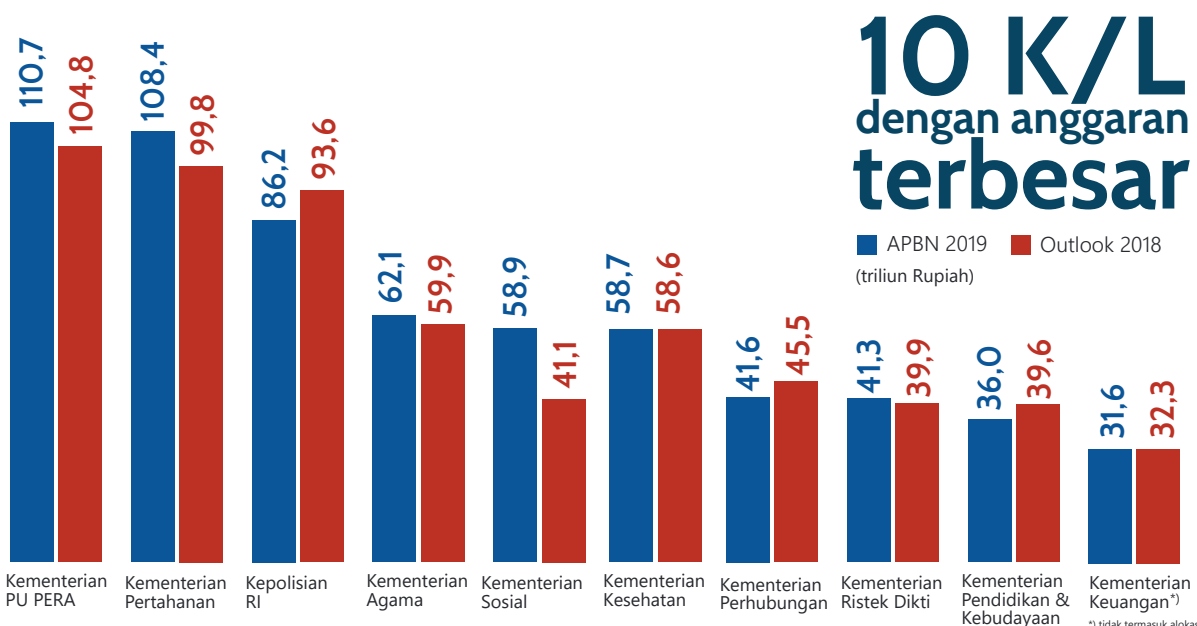
## Anggaran Belanja K/L, 2014-2019

(triliun Rupiah)



## Perbaikan Pengelolaan Belanja K/L

- Fokus Prioritas**
  - penajaman dan penguatan program prioritas
- Sinergi**
  - koordinasi pengelolaan anggaran strategis (yokasi, promosi, riset, pembangunan sarpras pendidikan)
- Efisiensi & Efektivitas**
  - capping belanja barang untuk meningkatkan pendanaan program prioritas
- Monitor Hasil**
  - komprehensif dan terkoordinasi melalui sinergi sistem informasi
- Inovasi**
  - mengembangkan skema pembiayaan dengan meningkatkan peran swasta untuk proyek infrastruktur (Skema KPBU-AP)
- Percepatan Pelaksanaan**
  - kegiatan melalui lelang dini melalui perencanaan yang lebih baik



# Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Menggambarkan fokus pemerintah dalam melaksanakan berbagai prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

## Peningkatan Signifikan

pada beberapa fungsi disebabkan oleh:

### a. Fungsi Pelayanan Umum

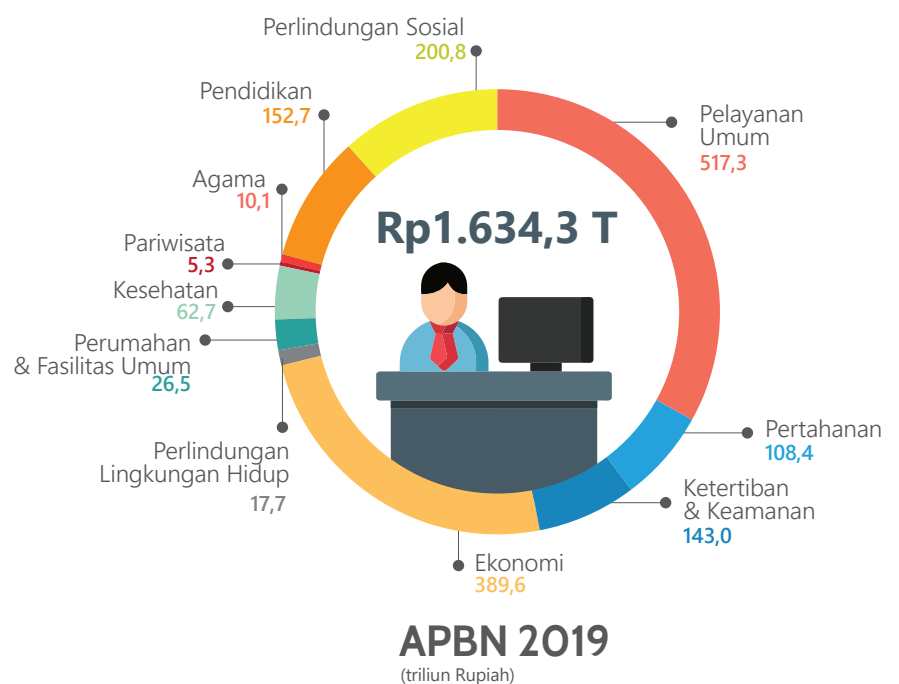
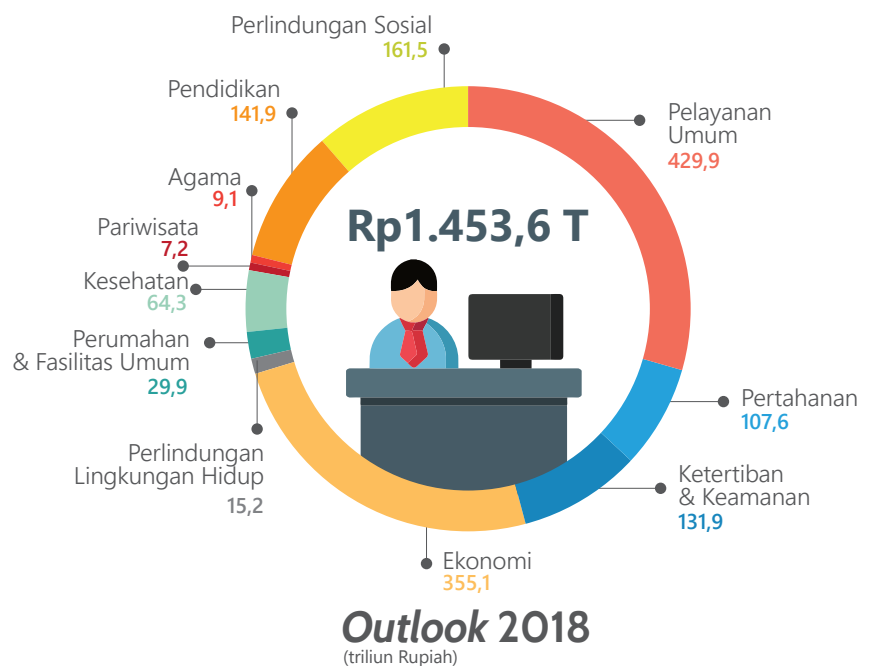
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan mendukung pelaksanaan pemilu 2019

### b. Fungsi Ekonomi

untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan transportasi, infrastruktur, energi, dan kedaulatan pangan, serta pengembangan UMKM dan koperasi

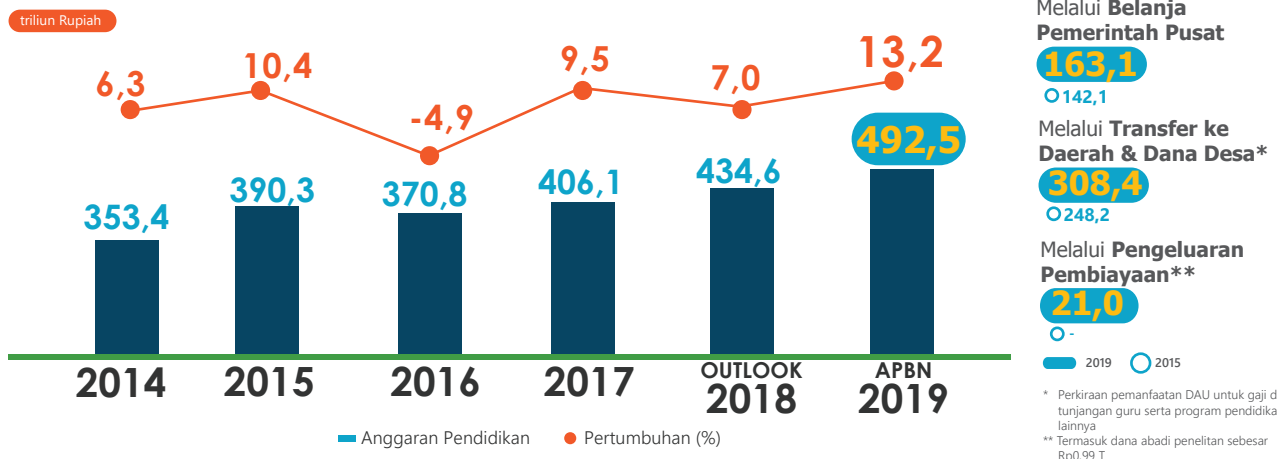
### c. Fungsi Perlindungan Sosial

untuk menjaga konsistensi penurunan jumlah penduduk miskin terutama melalui penguatan program PKH, serta peningkatan manfaat pensiun PNS/TNI/Polri



# Anggaran Pendidikan

tetap dijaga 20% APBN, diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas SDM



## Indikator Pendidikan

● 2019    ● 2015



**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

● 71,98    ● 69,55



**APM Pendidikan SMP/Sederajat**

● 82,02    ● 79,42



**APM Pendidikan SMA/Sederajat**

● 67,48    ● 55,26



### Peningkatan Kualitas

- Peningkatan kualitas guru** melalui sertifikasi dan redistribusi guru antardaerah
- Peningkatan efektivitas BOS**
  - Pengalihan BOS dari Kemendikbud ke DAK (2016)
  - BOS berdasarkan kinerja (2019)



### Perbaikan Akses

- Program Indonesia Pintar 19-20 juta siswa/tahun** → diikuti peningkatan ketepatan sasaran
- Percepatan pembangunan sarpras sekolah dan universitas** (sebagian dilaksanakan Kemen PU PR, dan DAK disupervisi Kemen PUPR)
- Perluasan program beasiswa afirmasi/bidik misi** (2015: 269 rb) → (2019 : 471 rb)
- Penguatan LPDP dalam bentuk SWF** selaku pengelola dana abadi Pendidikan mulai tahun 2017, serta akan menyalurkan 27 ribu beasiswa sampai dengan tahun 2019.



### Penguatan Sinergi

- Sinergi Penganggaran** KL dan DAK
- Enforcement** pemenuhan anggaran pendidikan oleh Pemda
- Link and match** pendidikan vokasi



# Anggaran Pendidikan

Peningkatan efektivitas dan peningkatan ketepatan sasaran

## Capaian dan Target Pembangunan Pendidikan

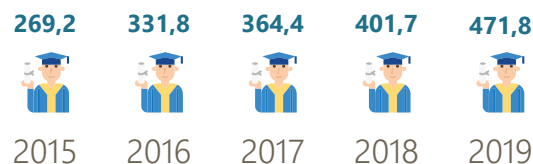
### Program Indonesia Pintar (juta siswa)



### Penerimaan beasiswa LPDP (ribu siswa)



### Beasiswa Bidik Misi (ribu mahasiswa)



### Bantuan Operasional Sekolah (juta jiwa)\*



\* melalui Kemenag dan DAK

### Pembangunan/Rehab Ruang Kelas



\*) Data capaian DAK tidak tersedia

\*\*) Termasuk yang akan dibangun oleh KemenPUPR

### TPG PNS (juta guru)



# Anggaran Pendidikan Pendidikan Vokasi

untuk peningkatan kualifikasi sumber daya manusia dalam menghadapi dunia kerja

## Kebijakan

- Mendorong keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
- Penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan teknologi
- Peningkatan kompetensi tenaga pendidik vokasi
- Revitalisasi pendidikan tinggi vokasi pada 12 Politeknik
- Pemberian beasiswa untuk pendidikan vokasi melalui LPDP
- Penyusunan regulasi terkait sistem dan mekanisme pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan (SNP)
- Kebijakan vokasi akan dikoordinasikan Kemenaker

## Alokasi Vokasi melalui Belanja K/L

2019

16,8

triliun Rupiah



### Kemenaker, a.l.:

- Pelatihan 235 ribu naker
- Peningkatan kompetensi 6.711 instruktur/tenaga pelatihan
- Sertifikasi 526 ribu tenaga kerja pembangunan sarpras (kelas dan laboratorium) 1.000 pesantren @Rp1 miliar.



### Kemenristekdikti, a.l. :

- Revitalisasi 12 Politeknik
- Bantuan pelatihan/sertifikasi 3.000 mahasiswa
- Pendidikan vokasi untuk 127,8 ribu mahasiswa



### Kemenpar, a.l. :

- Peningkatan kualitas Poltekpar dan kapasitas pengajar



### Kemenhub, a.l. :

- Diklat vokasi di 26 lembaga diklat (491 ribu orang)



### Kemendikbud, a.l. :

- 1.407 ruang praktek SMK
- BOP Vokasi Paket C untuk 240 ribu orang
- Peralatan pendidikan SMK 6 ribu paket



### Kemenperin, a.l. :

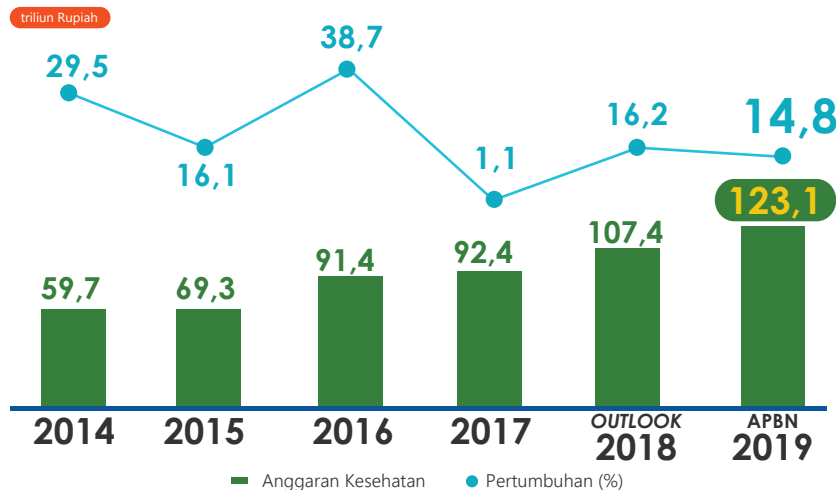
- Diklat Tenaga Kerja Industri Kompeten • Sistem 3 in 1 (70 ribu orang)
- *Pilot Project Learning Factory* berbasis Industri 4.0
- 10 politeknik industri berbasis kompetensi menuju *dual system*





# Anggaran Kesehatan

meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan *stunting*



Melalui Belanja Pemerintah Pusat

**89,8**

○ 58,1

Melalui Transfer ke Daerah & Dana Desa

**33,4**

○ 6,3

■ 2019 ○ 2015

## Indikator Kesehatan

● 2019 ● 2015

**Stunting**

● 24,8% ● 29,0%

**Prevalensi Tuberkulosis per 100 ribu penduduk**

● 245 ● 263

**Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria**

● 300 ● 232



### Perbaikan Akses

- Perluasan Penerima Bantuan Iuran** dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (**2015: 86,4 juta jiwa; 2019: 96,8 juta jiwa**) → diikuti peningkatan ketepatan sasaran
- Perbaikan pelayanan di **fasilitas kesehatan tingkat pertama**



### Peningkatan Kualitas

- Peningkatan kualitas dan ketersediaan **tenaga kesehatan**
- Peningkatan efektivitas **BOK dan BOKB**
  - Pengalihan BOK dan BOKB dari Kemenkes ke DAK (2016)
- Penguatan program **promotive dan preventif**
  - Mendorong pola hidup sehat melalui Germas
  - Peningkatan nutrisi ibu hamil, menyusui dan balita dan imunisasi



### Penguatan Sinergi

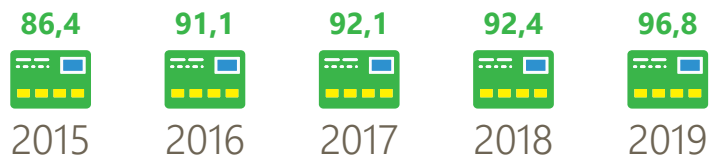
- Sinergi Penganggaran** KL dan DAK
- Enforcement** pemenuhan anggaran kesehatan oleh Pemda
- Mendorong KPBU** untuk pembangunan RS di daerah
- Penguatan upaya penanganan **stunting**

# Anggaran Kesehatan

Penguatan program promotif, preventif, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan menjaga keberlanjutan JKN

## Capaian dan Target Pembangunan Kesehatan

### Kartu Indonesia Sehat (juta jiwa PBI)



### Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas



### Sertifikasi obat dan makanan (ribu)

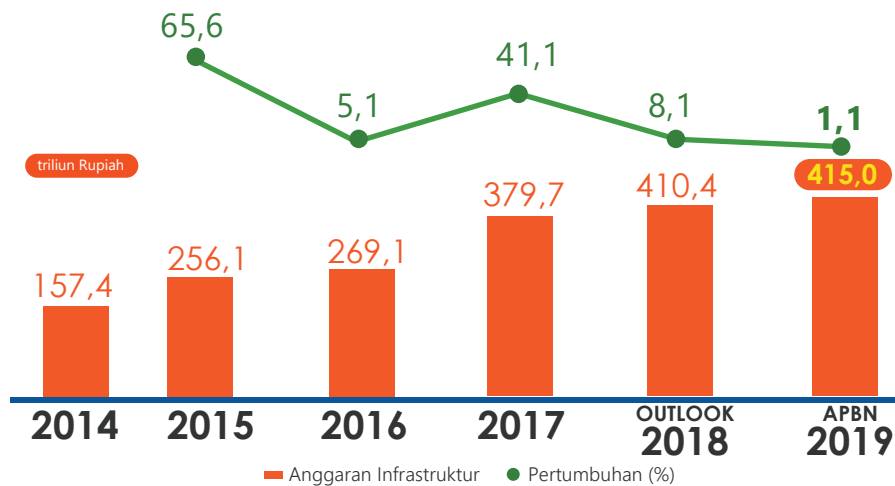


### Kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses (juta)



# Anggaran Infrastruktur

Diarahkan untuk mendukung penguatan konektivitas, penyediaan perumahan, dan ketahanan pangan



Melalui **Belanja Pemerintah Pusat**

**173,8**

○ 2015: 183,0

Melalui **Transfer ke Daerah & Dana Desa\***

**196,2**

○ 2015: 39,1

\* termasuk pemanfaatan 25% DTU untuk infrastruktur

Melalui **Pembiayaan**

**45,0**

○ 2015: 34,1

## Indikator Pembangunan Infrastruktur

● 2019 ● 2015

Prosentase Kondisi mantap jalan

● 94 ● 93

Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia

● 40 ● 114  
menuju menuju

Presentase RT yang menempati hunian layak

● 50,0 ● 47,8  
2018



- Peningkatan efektivitas alokasi anggaran infrastruktur dan memperbaiki eksekusi proyek infrastruktur;



- Fokus infrastruktur konektivitas, dan peningkatan kapasitas produksi al: jalan, bandara, pelabuhan, energi dan ketenagalistrikan, irigasi bendungan serta embung



- Mengoptimalkan peran Pemda, melalui transfer ke daerah:
  - DAK untuk bidang infrastruktur seperti: jalan, irigasi, sanitasi dan perumahan.
  - 25 % DTU untuk infrastruktur (sejak 2017)
  - Dana desa untuk mendukung infrastruktur (sejak 2015)



- Mengoptimalkan peran BUMN dan Swasta
  - Investasi Pemerintah (termasuk PMN) untuk mendukung infrastruktur: LMAN untuk penyediaan lahan (mulai 2016), PMN untuk penugasan pembangunan infrastruktur
  - Pemberdayaan BUMN dan swasta melalui skema KPBU, seperti VGF (mulai 2015), PDF, penjaminan, dan KPBU AP (mulai 2019).



- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda



- Mendorong komitmen pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L terkait infrastruktur

# Anggaran Infrastruktur

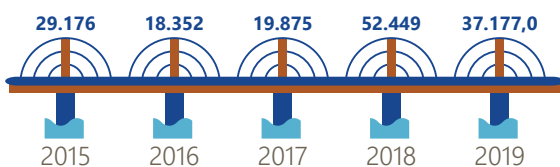
Penguatan pembangunan infrastruktur melalui terobosan pembiayaan kreatif untuk akselerasi penuntasan infrastruktur

## Capaian dan Target Pembangunan Infrastruktur

### Jalan (km)



### Jembatan (m)



### Jalan Tol melalui LMAN (proyek)



### Jalan Tol Trans Sumatera melalui PT Hutama karya (km)

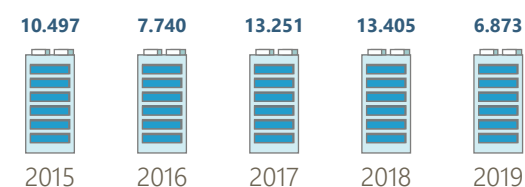


### Perumahan untuk MBR

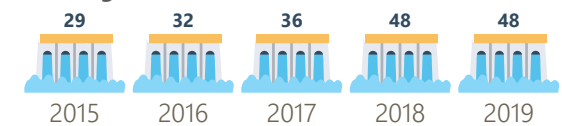
KPR Sejahtera/ FLPP (ribu unit)



### Rusun (unit)



### Bendungan (unit)\*



\* termasuk lanjutan pembangunan

### Pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur Kereta Api (km'sp)



### Penyelesaian Bandara Baru (lokasi)

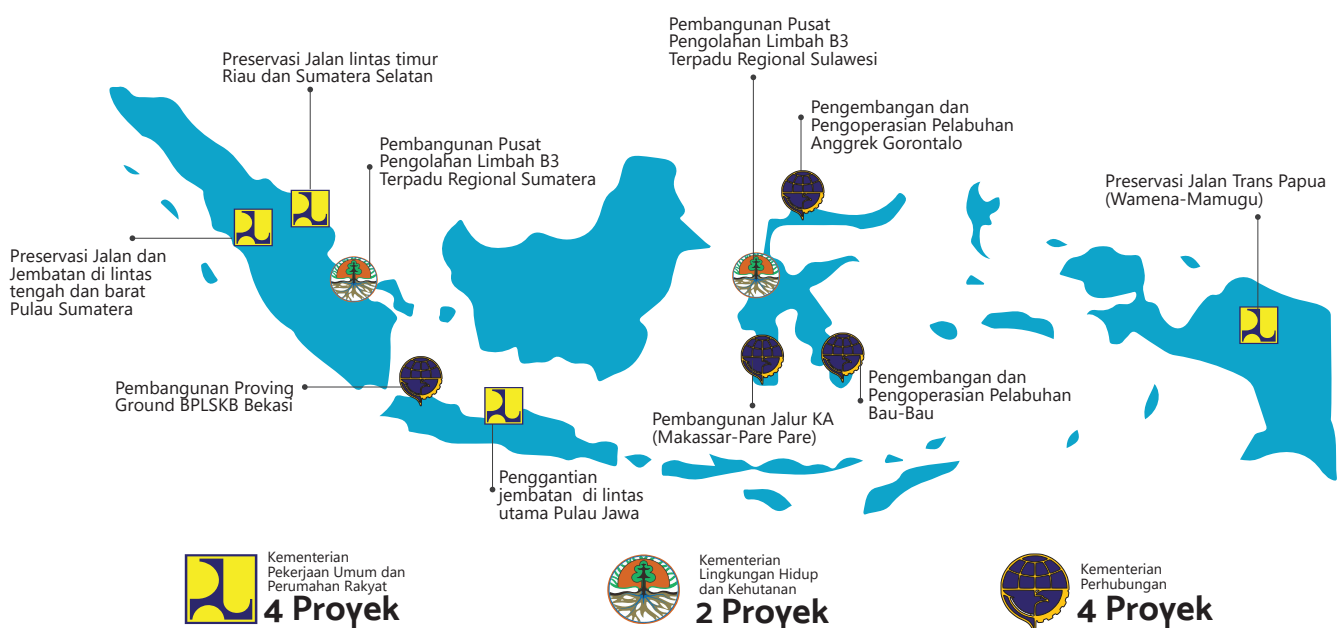


### Jaringan Irigasi (pembangunan dan rehab) (ribu ha)



# KPBU

Keterlibatan peran swasta dan BUMN dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui *creative financing* antara lain melalui skema KPBU AP pada tahun 2019 diharapkan mencapai Rp9,38 T



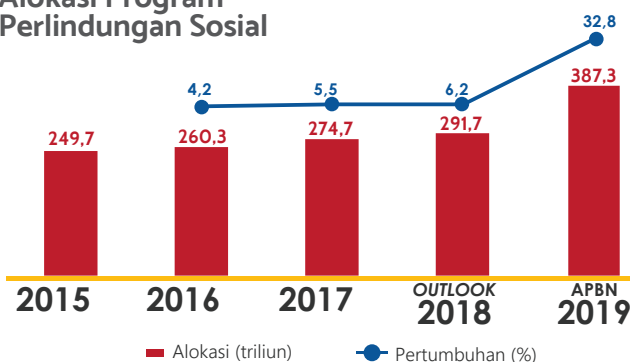
Untuk memenuhi percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah dituntut untuk mencari skema pendanaan kreatif (*creative financing*), antara lain skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). KPBU/*Public Private Partnership* (PPP) adalah sebuah skema penyediaan dan pembiayaan infrastruktur yang berdasarkan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha (swasta).

Salah satu poin penting dari skema KPBU, selain mendorong swasta untuk ikut membangun infrastruktur melalui pembagian risiko kepada pihak yang paling tepat. KPBU dapat meningkatkan kualitas APBN/APBD, mengurangi tekanan pengeluaran APBN/APBD, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas dari sebuah proyek infrastruktur.

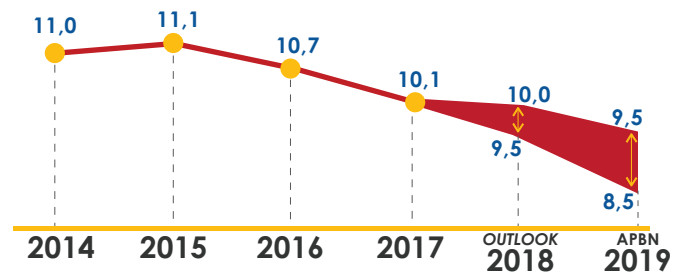
# Anggaran Perlindungan Sosial

Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan dari Pencapaian *Single Digit* (9,82%) di tahun 2018 menjadi 8,5% – 9,5% di tahun 2019

Alokasi Program Perlindungan Sosial



Tingkat Kemiskinan (%)



Memberikan jaminan perlindungan sosial khususnya bagi

**40%** penduduk termiskin



**Peningkatan peserta PBI JKN** menuju ke 96,8 juta jiwa



**Memperkuat Program Keluarga Harapan** melalui peningkatan besaran manfaat (bersyarat) dengan target sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat.



**Sasaran Bantuan Pangan nontunai** ditingkatkan bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat.



**Memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS)** untuk penataan aset produktif dan keberpihakan terhadap para petani dan rakyat kecil

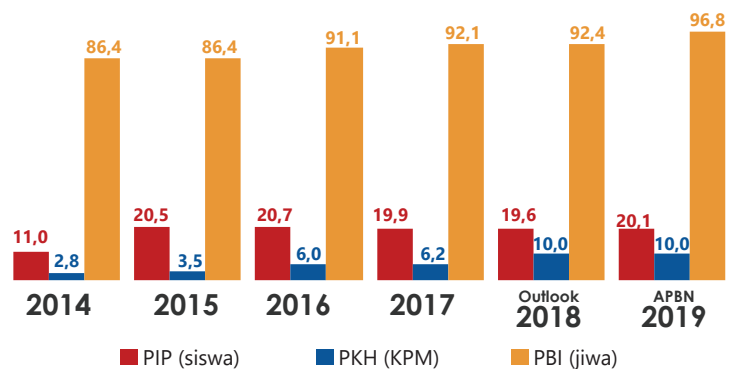
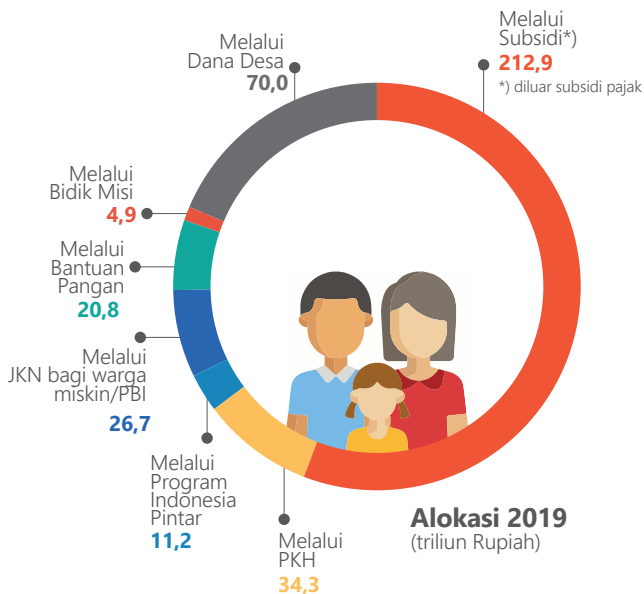


**Mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM):**

- insentif perpajakan khusus berupa tarif PPh final UMKM sebesar 0,5%,
- fasilitas kredit usaha rakyat melalui pemberian subsidi bunga kepada 12,8 juta debitur lama dan 4 juta debitur baru
- penyaluran dana bergulir untuk peningkatan akses dan penguatan modal bagi UMKM, termasuk usaha mikro pesantren.

# Anggaran Perlindungan Sosial

Sasaran dan Alokasi Penanggulangan Kemiskinan serta Dukungan pada Masyarakat Berpendapatan Rendah



## Penerima PIP, PKH, dan PBI (juta)

Memberikan jaminan perlindungan sosial khususnya bagi 40% penduduk termiskin.

## Sasaran dan alokasi penanggulangan kemiskinan

### Bidang Pendidikan



Program Indonesia Pintar  
**20,1**  
juta siswa



Bidik Misi  
**471,8**  
ribu mahasiswa

### Bidang Kesehatan



JKN bagi warga miskin/PBI  
**96,8**  
juta jiwa

### Bidang Kesejahteraan Rakyat



Subsidi  
\*) diluar subsidi pajak  
Bagi masyarakat kurang mampu



Bantuan sosial pangan/ BPNT  
**15,6**  
juta KPM

### Program Keluarga Harapan



PKH  
**10**  
juta KPM  
\*) termasuk safeguarding

### Bidang Pemberdayaan Rakyat



Dana Desa  
**74.953**  
Desa



Pembiayaan Ultra Mikro  
**1,4**  
juta debitur

# Anggaran Subsidi

diarahkan agar lebih tepat sasaran dan menuju penyaluran nontunai, melalui berbagai kebijakan di subsidi energi maupun nonenergi



## Kebijakan 2019

- Subsidi yang lebih tepat sasaran untuk membantu masyarakat yang kurang mampu
- Mendukung pengendalian inflasi
- Mempertahankan daya beli masyarakat
- Meningkatkan produksi pertanian

## Perkembangan Subsidi 2015-2019

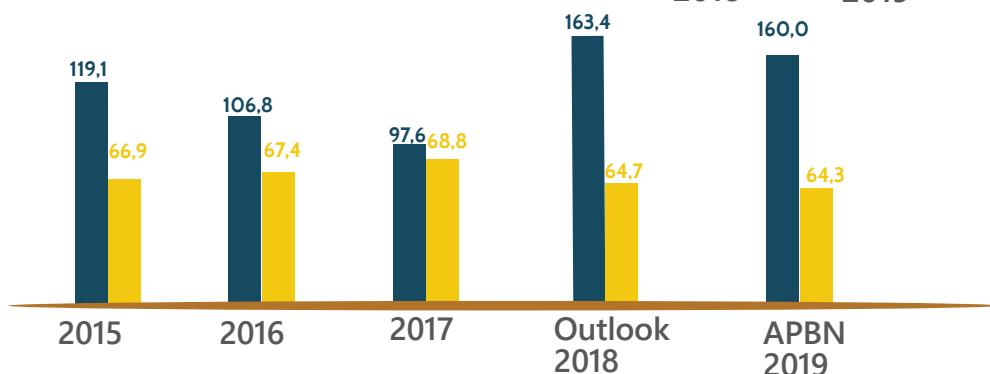
(triliun Rupiah)



## Anggaran Subsidi Menurun

Alokasi 2019 menurun sebesar Rp3,8T dari Outlook 2018

■ Subsidi Energi    ■ Subsidi Non Energi  
(triliun Rupiah)





# Anggaran Subsidi Energi

diarahkan agar lebih tepat sasaran dan meningkatkan porsi energi baru terbarukan

## Kebijakan



Diarahkan untuk masyarakat miskin



Pengendalian inflasi

## Subsidi BBM & LPG Rp100,7 T

### Kebijakan

- Perbaiki penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran
- Melanjutkan subsidi terbatas solar
- Perbaiki sasaran penerima LPG: rumah tangga, usaha mikro, kapal bagi nelayan kecil



Solar  
**14,5**  
juta kilo liter

Minyak Tanah  
**610**  
ribu kilo liter

LPG tabung 3 kg  
**7,0**  
juta ton

## Subsidi Listrik Rp59,3 T

### Kebijakan

- Perbaiki penyaluran untuk memperbaiki ketepatan sasaran
- Peningkatan rasio elektrifikasi
- Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan



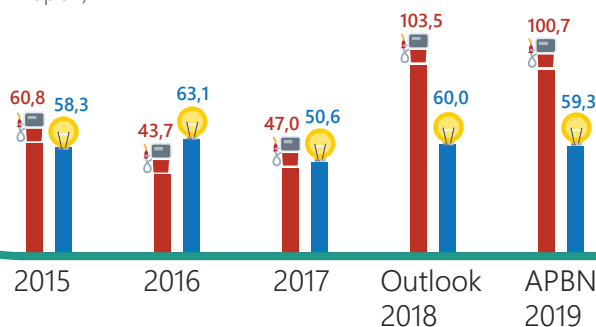
450 VA  
**23,2**  
juta pelanggan

900 VA miskin  
**6,1**  
juta pelanggan

## Perkembangan Subsidi Energi 2015-2019

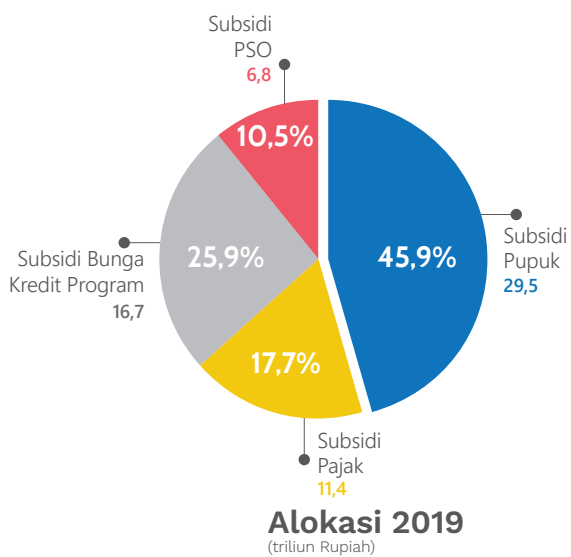
(triliun Rupiah)

- Subsidi BBM & LPG
- Subsidi Listrik



# Anggaran Subsidi Nonenergi

diarahkan agar lebih tepat sasaran dan menuju penyaluran nontunai



## Kebijakan

- Peningkatan produktifitas pertanian
- Perbaikan dan pelayanan umum bidang transportasi
- Meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan

### Subsidi Pupuk **Rp29,5 T**



- Penyempurnaan data penerima dengan NIK
- Volume pupuk 9,55 ton

### Subsidi Bunga Kredit Program **Rp16,7 T**



- Akses permodalan UMKM dengan subsidi bunga KUR
- Target penyaluran KUR Rp120,0 T dan suku bunga 7%
- Akses perumahan dengan subsidi selisih bunga (SSB) kredit perumahan dan bantuan uang muka bagi masyarakat berpenghasilan rendah

### Subsidi Pajak **Rp11,4 T**



- Peningkatan daya saing industri tertentu didalam negeri
- Insentif sektor panas bumi dan obligasi pemerintah

### Subsidi PSO **Rp6,8 T**

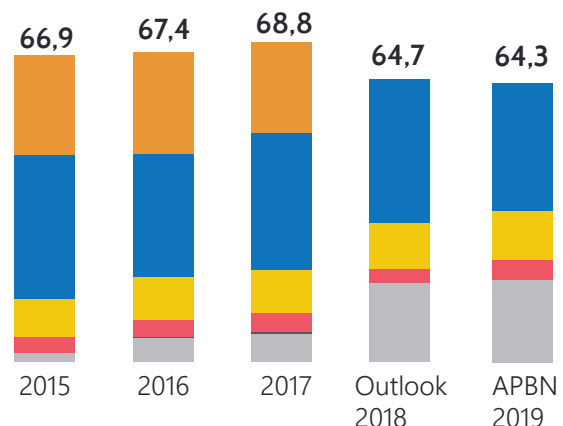


- Pelayanan publik bidang transportasi dan penyediaan informasi publik

## Perkembangan Subsidi Nonenergi 2015-2019

(triliun Rupiah)

	2015	2016	2017	Outlook 2018	APBN 2019
■ Pangan	21,8	22,1	19,5	-	-
■ Pupuk	31,3	26,9	28,8	36,5	29,5
■ Pajak	8,5	9,3	9,2	10,8	11,4
■ PSO	3,3	3,7	4,3	4,4	6,8
■ Benih	0,1	0,4	0,8	-	-
■ Bunga Kredit Program	1,9	5,1	6,1	13,0	16,7
<b>Total Subsidi Nonenergi</b>	<b>66,9</b>	<b>67,4</b>	<b>68,8</b>	<b>64,7</b>	<b>64,3</b>



# Transfer ke Daerah & Dana Desa

diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi kesenjangan pelayanan dasar publik antar daerah



## Reformasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa



Memperkuat **Taxing Power** daerah, melalui pengalihan PBBP2 menjadi pajak daerah pada tahun 2014



DAU 2019 bersifat **final** untuk meningkatkan kepastian sumber pendanaan APBD dan afirmasi daerah berciri kepulauan



Dana Desa terus meningkat dengan **penyempurnaan program prioritas dan fokus untuk mendukung penanganan kemiskinan** (skema padat karya tunai) dan pemberdayaan desa



Pengalokasian **BOS berbasis kinerja** pada tahun 2019



Pengalokasian **DAK Fisik berdasarkan proposal daerah (proposal based)** mulai tahun 2016



**Percepatan penyelesaian Kurang Bayar DBH** dan *sharing* beban bila harga migas melampaui target diikuti kenaikan subsidi



Dukungan pendanaan kelurahan melalui DAU Tambahan sebesar Rp3,0 T

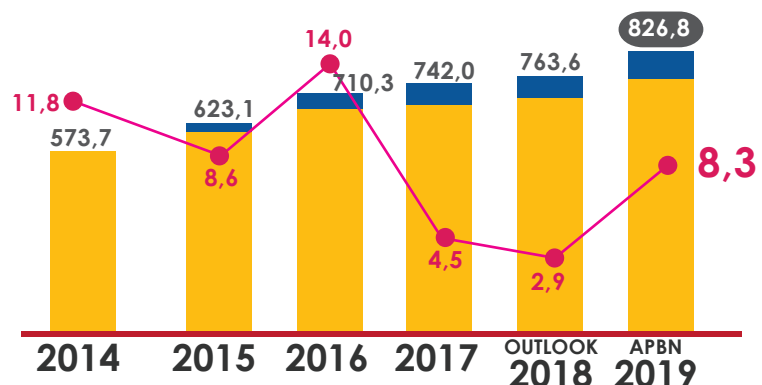


Penyaluran TKDD (Dana Transfer Khusus dan Dana Desa) **berbasis kinerja penyerapan dan capaian output** dan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN sejak 2017

## Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2014-2019

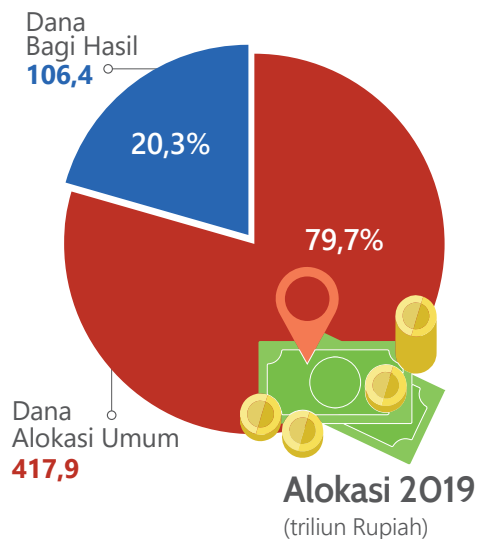
(triliun Rupiah)

■ Transfer ke Daerah  
■ Dana Desa  
● Pertumbuhan (%)



# Transfer ke Daerah & Dana Desa Dana Transfer Umum

Penguatan pengelolaan DTU sejalan dengan peningkatan dan perbaikan pelayanan publik



## Dana Alokasi Umum **Rp417,9 T**

- Pagu bersifat final
- Memperhitungkan kenaikan gaji pokok 5%, gaji ke-13, THR, dan formasi CPNS Daerah
- DAU Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan Rp3,0 T

## Dana Bagi Hasil **Rp106,4 T**

- Minimal 50% dari BDH CHT untuk mendukung program JKN
- Penyelesaian kurang bayar DBH pada triwulan IV
- *Sharing* beban subsidi BBM dan LPG jika realisasi PNBPN Migas melampaui target dalam pagu APBN

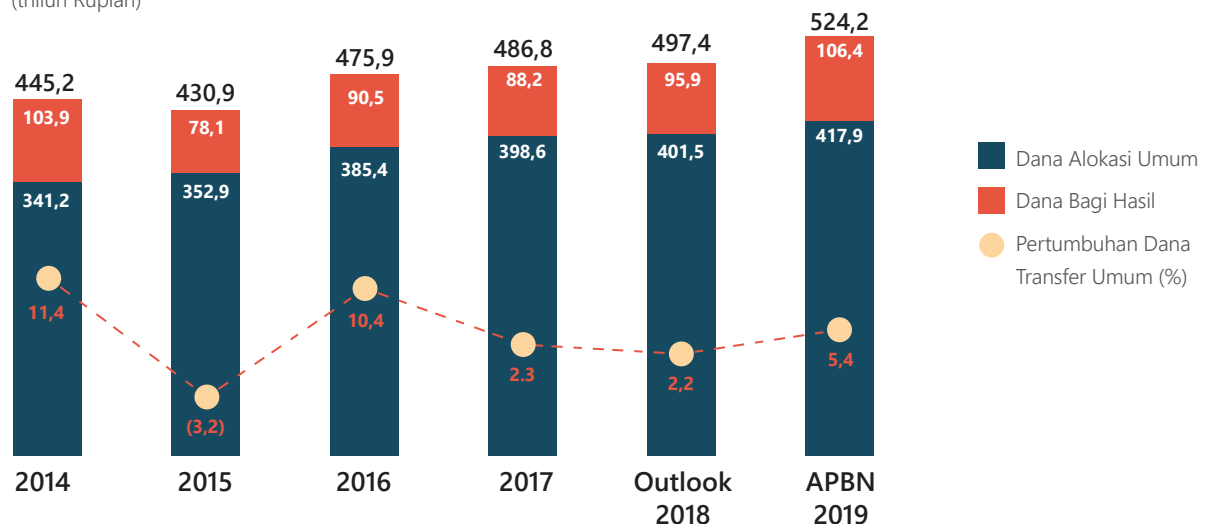
### Arah Kebijakan

Mempercepat pembangunan, memperluas akses daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

**25% untuk belanja infrastruktur**

### Perkembangan Dana Transfer Umum 2014-2019

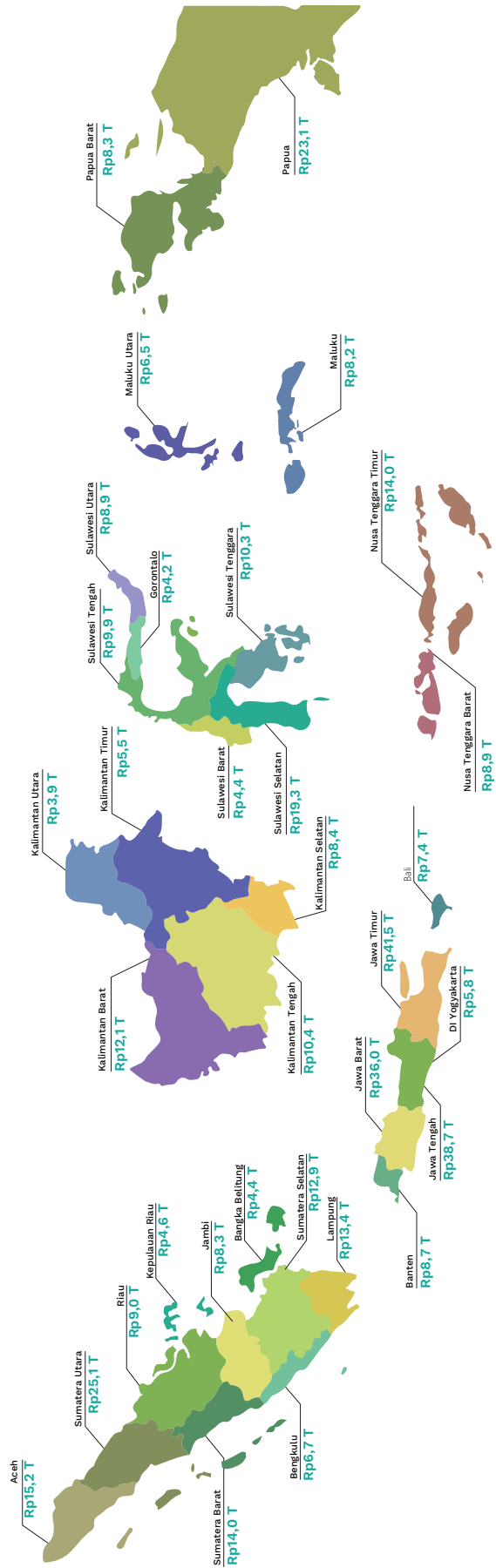
(triliun Rupiah)



# Dana Alokasi Umum

## Rp417,9 T

(termasuk DAU Tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan Rp3,0 T)



# Dana Alokasi Umum Tambahan

## Dukungan Pendanaan Kelurahan

Memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sesuai PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

### Arah Kebijakan



- Kebijakan ini bersifat melengkapi tanpa mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



- Memperkuat pengawasan dengan mengoptimalkan peran aparat pengawas fungsional di Daerah karena pendanaan tersebut bagian dari Belanja APBD.



- Pengendalian melalui penyaluran dan penguatan pemantauan dan evaluasi.

**8.212**  
kelurahan pada

**410**  
kabupaten/kota

### Metode Pengalokasian

dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

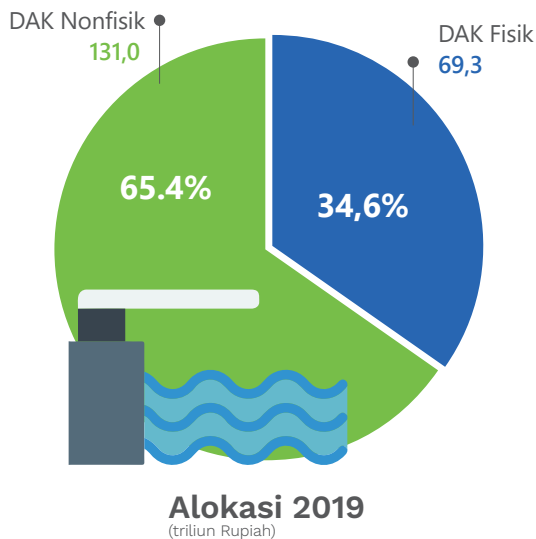
KATEGORI	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH	DAU	PAGU
SATUAN	DAERAH	KELURAHAN	JUTA	MILIAR
BAIK	91	2.805	352,94	990,00
PERLU DITINGKATKAN	257	4.782	370,14	1.770,00
SANGAT PERLU DITINGKATKAN	62	625	384,00	240,00
TOTAL	410	8.212		3.000,00



# Transfer ke Daerah & Dana Desa

## Dana Transfer Khusus

Dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah



### Arah Kebijakan

Berperan sebagai motor penyelaras pembangunan nasional untuk mendukung program Nawacita (terutama untuk pembangunan SDM, konektivitas, pariwisata, kesehatan, dan layanan dasar lainnya)



### DAK Fisik

**Rp69,3 T**

- Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik
- Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi



### DAK Non Fisik

**Rp131,0 T**

- Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah
- BOS untuk **47,0 juta siswa**
- Tunjangan Profesi Guru **1,2 juta guru**
- BOK **9.909 Puskesmas**



### Kebijakan DAK Fisik

- **Percepatan** penyediaan infrastruktur di daerah yang terkait dengan pelayanan dasar untuk pemenuhan SPM
- **Berdasarkan** usulan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional, dan tata kelola keuangan negara yang baik
- **Penguatan** proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan perencanaan DAK Fisik ke dalam aplikasi KRISNA



### Kebijakan DAK Nonfisik

- **Perbaikan** kualitas kinerja untuk seluruh bidang DAK Nonfisik
- **Pengalokasian** berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM
- **Penguatan** kebijakan afirmasi untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)
- **Penambahan** jenis DAK nonfisik jenis baru, yaitu, BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisata, dan Dana Bantuan BLPS

# Transfer ke Daerah & Dana Desa

## Dana Transfer Khusus

Dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah

### DAK Fisik

**Rp69,3 T**

(triliun Rupiah)

- Mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik
- Afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi

#### DAK Afirmasi

**6,7**

#### DAK Penugasan

**19,0**

#### DAK Reguler

**43,6**

0 69,3

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan <b>3,1 T</b></li> <li>• Perumahan &amp; Pemukiman <b>0,5 T</b></li> <li>• Transportasi <b>1,5 T</b></li> <li>• Air Minum <b>0,5 T</b></li> <li>• Sanitasi <b>0,5 T</b></li> <li>• Pendidikan <b>0,6 T</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan SMK <b>2,3 T</b></li> <li>• Kesehatan dan KB <b>5,6 T</b></li> <li>• Air Minum <b>0,8 T</b></li> <li>• Sanitasi <b>0,8 T</b></li> <li>• Jalan <b>4,0 T</b></li> <li>• Pasar <b>1,8 T</b></li> <li>• Irigasi <b>3,0 T</b></li> <li>• Lingkungan Hidup &amp; kehutanan <b>0,5 T</b></li> <li>• Pariwisata <b>0,3 T</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan <b>14,0 T</b></li> <li>• Kesehatan dan KB <b>11,2 T</b></li> <li>• Air Minum <b>0,8 T</b></li> <li>• Sanitasi <b>0,8 T</b></li> <li>• Perumahan &amp; Pemukiman <b>0,6 T</b></li> <li>• Industri Kecil dan Menengah <b>0,5 T</b></li> <li>• Pertanian <b>1,9 T</b></li> <li>• Pariwisata <b>0,7 T</b></li> <li>• Jalan <b>12,2 T</b></li> <li>• Kelautan &amp; Perikanan <b>0,9 T</b></li> </ul> |
|---|---|--|

### DAK Nonfisik

**Rp131,0 T**

(triliun Rupiah)

- Mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik terutama perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan pemerintah

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bantuan Operasional Sekolah (BOS)<br/><b>Rp51,2 T</b><br/>--&gt; 47,0 juta siswa</li> <li>➤ Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini<br/><b>Rp4,5 T</b><br/>--&gt; 7,5 juta peserta didik</li> <li>➤ Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah<br/><b>Rp56,9 T</b><br/>--&gt; 1,2 juta guru</li> <li>➤ Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus<br/><b>Rp2,3 T</b><br/>--&gt; 59,0 ribu guru</li> <li>➤ BOP Kesetaraan<br/><b>Rp1,5 T</b><br/>--&gt; 925 ribu peserta didik</li> <li>➤ Pelayanan Kepariwisata<br/><b>Rp0,2 T</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah<br/><b>Rp0,9 T</b><br/>--&gt; 254 ribu guru</li> <li>➤ Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOK dan BOKB)<br/><b>Rp12,2 T</b><br/>--&gt; 9.909 puskesmas dan 5.920 balai penyuluhan</li> <li>➤ Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)<br/><b>Rp0,2 T</b><br/>--&gt; 56,1 ribu peserta</li> <li>➤ Pelayanan Administrasi Kependudukan<br/><b>Rp0,9 T</b><br/>--&gt; 34 provinsi dan 508 kab/kota</li> <li>➤ Bantuan BLPS<br/><b>Rp0,03 T</b></li> <li>➤ Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum &amp; Taman Budaya<br/><b>Rp0,1 T</b><br/>--&gt; 111 museum dan 20 taman budaya</li> </ul> |
|--|--|



# Transfer ke Daerah & Dana Desa Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY

Dialokasikan kepada daerah sebagai insentif untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan peraturan perundangan



## Rp10,0 T Dana Insentif Daerah

Untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal daerah, kualitas pelayanan pemerintahan umum, kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan upaya pengentasan kemiskinan

### Kriteria Pemberian DID

#### Kriteria utama

- Opini BPK atas LKPD
- Penetapan Perda APBD tepat waktu
- Penggunaan *e-government*
- Ketersediaan PTSP

#### Kriteria Kinerja

- Tata kelola keuangan daerah
- Pelayanan umum pemerintahan
- Pelayanan dasar publik
- Kesejahteraan masyarakat



## Rp21,0 T Dana Otonomi Khusus

### Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Rp8,4 T

untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan

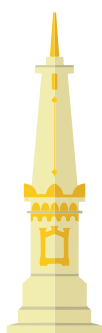
### Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat

Rp8,4 T

terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan

### Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat

Rp4,3 T



## Rp1,2 T Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta

**Meningkatkan** kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan dana keistimewaan DIY sesuai dengan program prioritas nasional

**Meningkatkan** monitoring dan evaluasi dalam rangka mendukung akuntabilitas penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY

**Mendorong** percepatan pelaporan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja.

# Transfer ke Daerah & Dana Desa

## Dana Desa

Mendorong penggunaan anggaran di daerah secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip *value for money*

### Prioritas Penggunaan Dana Desa



#### Pembangunan Desa

Sarana Prasarana, Pelayanan Sosial Dasar, Sarana Ekonomi Desa, Pembangunan Embung, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana Alam.



#### Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif, Penguatan Kapasitas terhadap Bencana, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Tata Kelola Desa yang Demokratis.

### Arah Kebijakan

- **Meningkatkan** pagu anggaran dana desa
- **Menyempurnakan** formulasi pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan berkeadilan
- **Mengoptimalkan** pemanfaatan dana desa pada beberapa kegiatan prioritas desa
- **Melanjutkan** skema padat karya tunai dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana fisik
- **Meningkatkan** porsi pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat
- **Meningkatkan** perekonomian desa, melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menciptakan produk unggulan desa, dan memberikan kemudahan akses permodalan
- **Meningkatkan** akuntabilitas pelaksanaan dana desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan
- **Sinergi** pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha
- **Penguatan** atas monev pelaksanaan kebijakan dana desa, kapasitas SDM perangkat desa, serta koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dari tingkat pemerintahan pusat, pemda, kecamatan hingga desa

### Prioritas Pelaksanaan



Tenaga kerja setempat



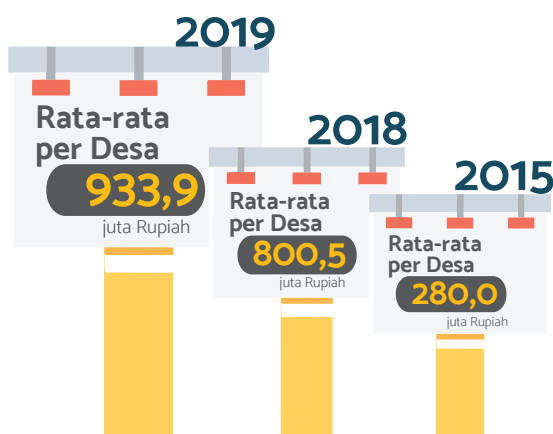
Bahan baku lokal



Swakelola

### Penyaluran

berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan capaian output yang dilakukan melalui KPPN setempat.



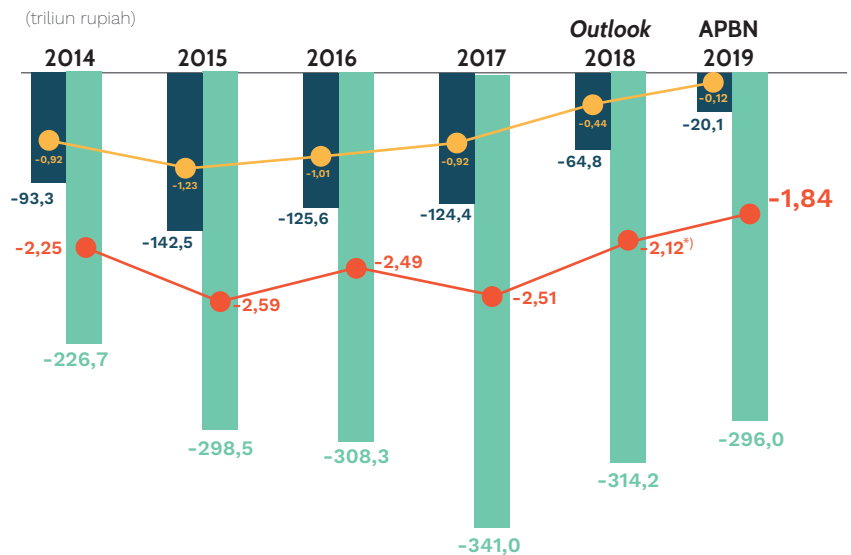
# Defisit Anggaran

## Defisit APBN Tahun 2019

Defisit dalam APBN 2019 (1,84% thd PDB) ditekan lebih rendah dari *outlook* 2018 (2,12% thd PDB). Kebijakan defisit anggaran ditempuh untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal

■ Defisit  
● Defisit thd PDB (%)  
■ Keseimbangan Primer  
● Defisit thd Keseimbangan Primer (%)

\*) Outlook pada Laporan Semester I tahun 2018. Sesuai proyeksi terkini, defisit APBN tahun 2018 diperkirakan dibawah 2% terhadap PDB (pada kisaran 1,8-1,9% terhadap PDB dengan defisit keseimbangan primer Rp6,7 T-Rp21,4 T)

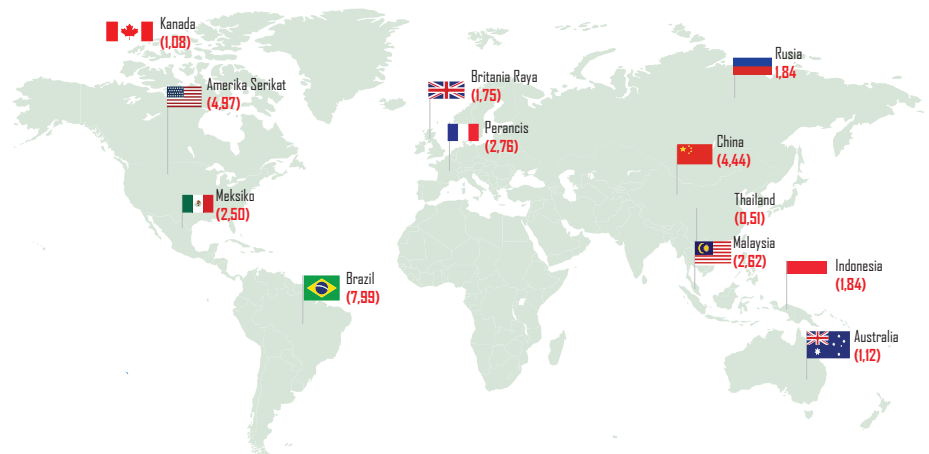


## Kebijakan

- Mengendalikan defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan, serta efisiensi subsidi dan belanja konsumtif
- Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali
- Mendorong keseimbangan primer menuju positif
- Mengembangkan pembiayaan yang inovatif dan kreatif (*creative financing*)

## Defisit terhadap PDB Beberapa Negara

(sumber data: IMF World Economic Outlook, Oktober 2018)



# Pembiayaan Anggaran

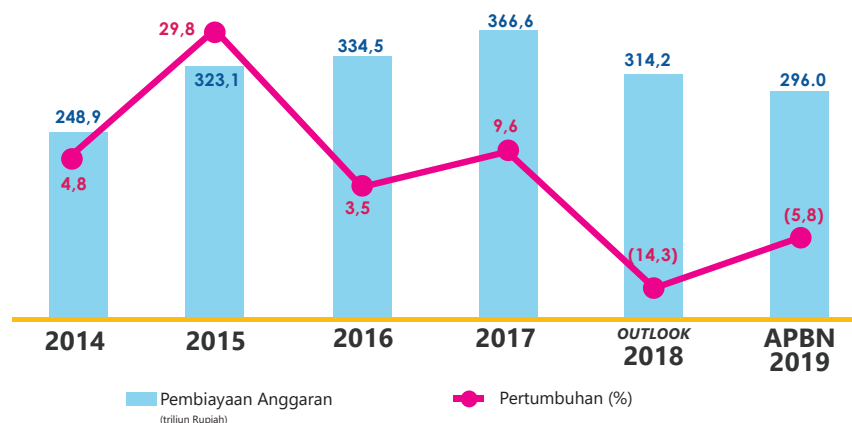
Outlook 2018	(triliun rupiah)	APBN 2019
<b>314,2</b>	<b>Pembiayaan Anggaran</b>	<b>296,0</b>
387,4	Pembiayaan Utang	359,3
388,0	SBN (neto)	389,0
-0,6	Pinjaman (neto)	-29,7
-65,7	Pembiayaan Investasi	-75,9
-6,5	Pemberian Pinjaman	-2,4
-1,1	Kewajiban Penjaminan	0
0,2	Pembiayaan Lainnya	15,0



## Arah Kebijakan Pembiayaan

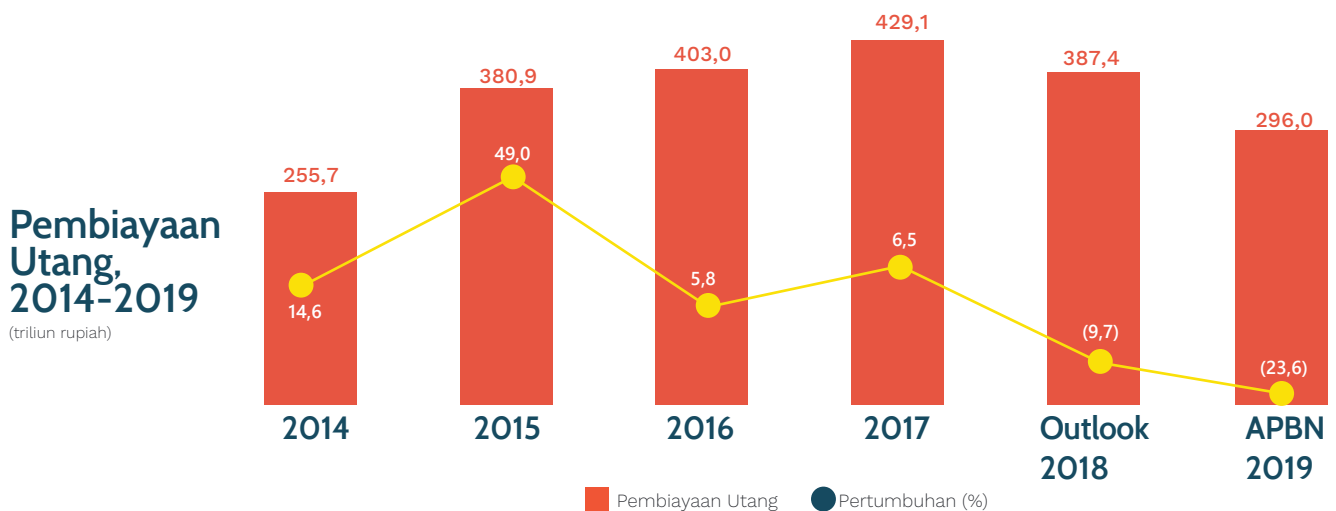
- Meningkatkan efisiensi pembiayaan utang
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pasar obligasi domestik (financial deepening)
- Mengelola pinjaman luar negeri secara selektif;
- Meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional
- Mendorong program ekspor nasional

## Perkembangan Pembiayaan Anggaran, 2014-2019



# Pembiayaan Utang

dikelola secara hati-hati (*prudent*), dan produktif sehingga dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat



## Pembiayaan Utang

membiayai defisit anggaran, pembiayaan investasi terutama PMN kepada BUMN dan BLU, serta pemberian pinjaman kepada BUMN dan Pemda



**Outstanding Utang Pemerintah**  
**Rp4.227,8 T**  
(s.d. Juni 2018)

## Kebijakan Pembiayaan Utang



### Kehati-hatian

dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang dan diupayakan menurun secara bertahap dalam jangka menengah

### Efisiensi Biaya Utang

mendorong efisiensi biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan fiskal

### Produktivitas

mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan, antara lain melalui pembiayaan investasi dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur

### Keseimbangan

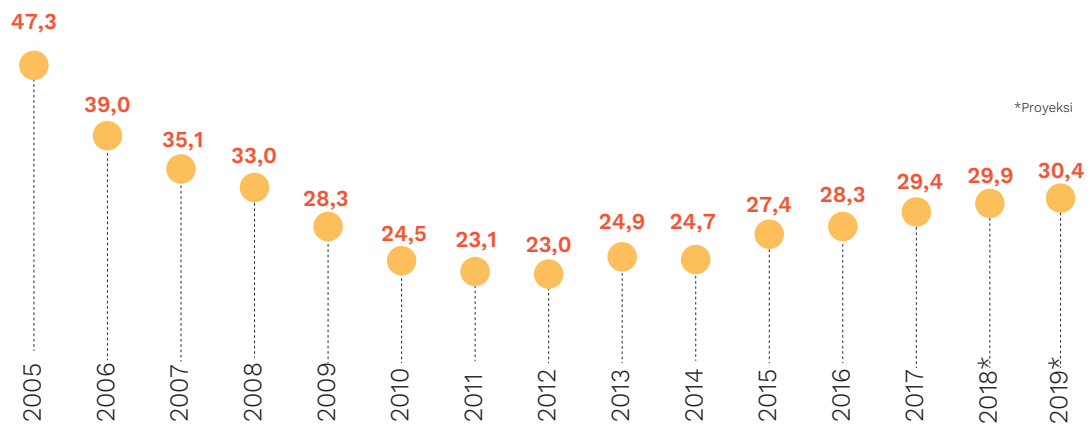
menjaga komposisi utang dalam batas terkendali untuk pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi.

# Profil Utang Pemerintah

Rasio utang dijaga dalam batas aman dan diupayakan semakin menurun

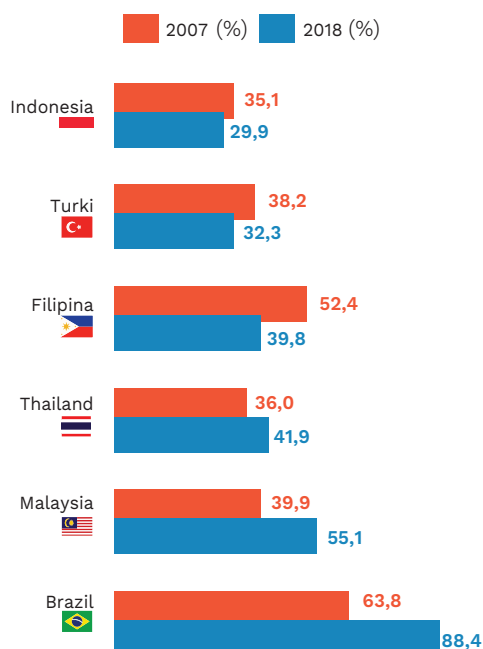
## Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 2005-2018

persen (%)



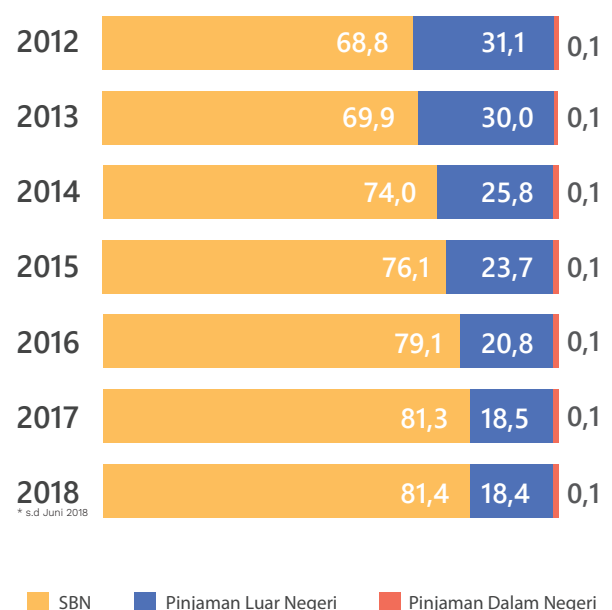
Catatan: Dalam Undang-undang Keuangan Negara diamanatkan batas maksimal 60% dari PDB

## Rasio Utang Beberapa Negara Berkembang



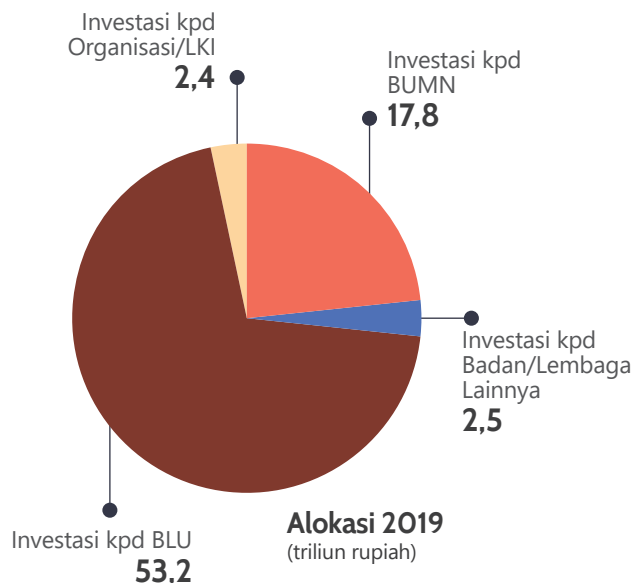
## Komposisi Instrumen Utang dalam Outstanding Utang Pemerintah

(persen)

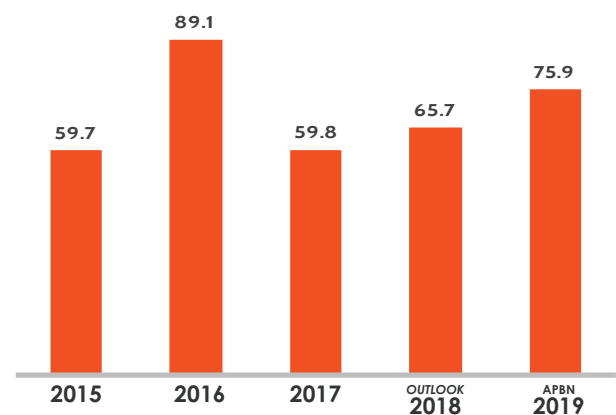


# Pembiayaan Investasi

Mengakselerasi pencapaian program pembangunan



## Perkembangan Pembiayaan Investasi 2015-2019 (triliun rupiah)



## Strategi Kebijakan Pembiayaan Investasi

- Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur
- Meningkatkan akses pembiayaan usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah
- Meningkatkan akses pendanaan dan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui penguatan peran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai SWF Pendidikan
- Mendukung kerja sama internasional sebagai anggota Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha Internasional
- Mendorong peningkatan ekspor nasional
- Mempercepat realisasi pembiayaan investasi BLU LMAN untuk pembebasan lahan yang diperlukan dalam prioritas pembangunan nasional
- Penguatan sektor keuangan melalui sinergi BUMN dan mendukung pembangunan infrastruktur

# Pembiayaan Investasi

Mendukung kebijakan pemerintah di berbagai sektor

## Investasi Kepada BUMN Rp17,8 T



**PT Hutama Karya**  
Rp10,5 T

Penyelesaian ruas-ruas prioritas dari Jalan Tol Trans Sumatera



**PT Sarana  
Multigriya Finansial**  
Rp0,8 T

Menyediakan dana dengan *cost of fund* yang lebih rendah untuk penyalur KPR FLPP



**PT PLN**  
Rp6,5 T

Menyelesaikan pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan

## Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya Rp2,5 T



**Lembaga Pembiayaan Ekspor  
Indonesia** Rp2,5 T

tersedianya pembiayaan ekspor dengan suku bunga yang relatif rendah.

- Alokasi untuk peningkatan kapasitas usaha sebesar Rp1,5 T
- Alokasi dalam rangka penugasan khusus ekspor sebesar Rp1,0 T

## Investasi Kepada Organisasi/LKI/ Badan Usaha Internasional Rp2,4 T

dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (*shares*) dan hak suara (*voting rights*)





# Pembiayaan Investasi

Mendukung kebijakan pemerintah di berbagai sektor

## **Investasi Kepada BLU** **Rp53,2 T**

### **Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan** **Rp5,2 T**

Memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk KPR Sejahtera sekitar 84.000 unit rumah MBR tahun 2019

### **Pusat Investasi Pemerintah** **Rp3,0 T**

Jumlah usaha ultra mikro termasuk usaha rintisan yang mendapat fasilitas pembiayaan UMi sebanyak 600.000 debitur

### **Dana Pengembangan Pendidikan Nasional** **Rp20,0 T**

Beasiswa bagi 6.000 mahasiswa baru dan mahasiswa lama (*ongoing student*) sebanyak 10.000 orang

### **Lembaga Manajemen Aset Negara** **Rp22,0 T**

Penyediaan uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur PSN

### **Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional** **Rp3,0 T**

Pelaksanaan 70 kegiatan program kerja sama pembangunan internasional, kerja sama teknik untuk 1.200 orang, kerja sama pembangunan internasional kepada 66 negara dan/atau lembaga asing

### **Dana Abadi Penelitian** **Rp1,0 T**

Dana abadi untuk pembiayaan penelitian



# GLOSSARY

## **Keseimbangan primer**

menggambarkan kemampuan Pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakan sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.

## **Pajak**

Terdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.

## **Kepabeanan dan Cukai**

Terdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol), bea masuk, dan bea keluar.

## **PNBP**

Terdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan BLU.

## **Penerimaan Hibah**

Terdiri atas penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

## **Tax ratio**

dalam definisi luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA migas dan pertambangan mineral dengan PDB nominal. Sedangkan *tax ratio* dalam definisi sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

## **Pembayaran Bunga Utang**

Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.

## **Transfer ke Daerah**

Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

## **Belanja Kementerian Negara/Lembaga**

Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.

## **Belanja Non-K/L (BA BUN)**

Pengeluaran negara untuk Program Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Hibah, Program Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus

## **Dana Desa**

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## **Subsidi**

Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

# GLOSSARY

## **Belanja Menurut Fungsi, terdiri dari:**

**Fungsi Pelayanan Umum** a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain);

**Fungsi Pertahanan** a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara;

**Fungsi Ketertiban dan Keamanan** a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas;

**Fungsi Ekonomi** a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;

**Fungsi Lingkungan Hidup** a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi;

**Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum** a.l. terdiri atas Fasilitas Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

**Fungsi Kesehatan** a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

**Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri;

**Fungsi Agama** a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha;

**Fungsi Pendidikan** a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan;

**Fungsi Perlindungan Sosial** a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).

## **Subsidi Energi**

Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, LPG tabung 3 kg, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.

## **Subsidi Nonenergi**

Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.

## **Dana Perimbangan**

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## **Dana Otonomi Khusus**

diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh

# GLOSSARY

## **Pembiayaan Anggaran**

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

## **Surat Berharga Negara**

Meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

## **Surat Utang Negara (SUN)**

Surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

## **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**

SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

## **Penyertaan Modal Negara (PMN)**

Dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

## **Dana Bergulir**

Dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

## **Pinjaman Dalam Negeri**

Setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

## **Kewajiban Penjaminan**

Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama

## **Pinjaman Luar Negeri Neto**

Semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

## **Pemberian Pinjaman**

Pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.



# Butuh data APBN?



## lebih cepat

Data APBN dapat diakses secara cepat tanpa melalui surat permohonan data



## lebih mudah

tanpa harus mendaftar terlebih dahulu, data dapat diakses di mana saja dan kapan saja, baik melalui komputer mau handphone



## lebih fleksibel

Data yang disajikan dalam bentuk .xls atau .csv, sehingga dapat diolah secara langsung oleh program pemrosesan data

**KUNJUNGI** ►



**[data-apbn.kemenkeu.go.id](http://data-apbn.kemenkeu.go.id)**



portaldataapbn



portaldataAPBN

**PORTAL DATA**  
**APBN**  
open data for us







**KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

Jalan Dr Wahidin Raya No. 1  
Gedung Sutikno Slamet Lt.12  
[www.anggaran.kemenkeu.go.id](http://www.anggaran.kemenkeu.go.id)